

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
(Studi Kasus Di Guntung – Bontang)**



Tesis

Oleh
**ADEN MELAWAT LUBIS
L4K002021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
(Studi Kasus di Guntung - Bontang)

Disusun Oleh

Aden Melawat Lubis
L4K002021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 6 September 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing I


(Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES)

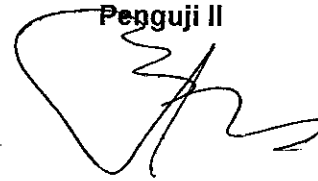
Pembimbing II


(Dra. Hartuti Burnaweni, MPA)

Penguji I


(Drs. Edi Santoso, SU)

Penguji II


(Ir. Slamet Muljono, MSi)

Mengetahui,
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,




Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES)

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3587/T/MIL/ef
Tgl.	4/3/05

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat disusun yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mengambil judul **“Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur (Studi Kasus di Guntung - Bontang)”**. Latar belakang dari judul tersebut pada dasarnya bermanfaat untuk :

- Mengetahui manfaat program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur bagi masyarakat Guntung.
- Mengetahui dampak program pemberdayaan tersebut bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- Membuat model pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk masyarakat Guntung.

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini, diantaranya kami tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dosen-dosen Pembimbing Di MIL dan jajaran administrasi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
6. Kepala Kompartemen SDM PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
7. Ketua Korps Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
8. Kepala Biro Rancang Bangun PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
9. Kepala Biro Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
10. Teman-teman Mahasiswa MIL kelas Bontang.

Semoga tulisan ini bermanfaat mohon dimaklumi atas segala kekurangannya.

Bontang, Agustus 2004

Penulis

Aden Melawat Lubis

Abstract

PT. Pupuk Kalimantan Timur has conducted a community development (CD) program in Guntung, Bontang, East Kalimantan since it was established many years ago. Nevertheless, some NGOs still claim that community development program managed in that village has not been giving optimal outcome to the community and is only advantageous to certain groups of people. Moreover, they argue that PT. Pupuk Kalimantan Timur has not offered adequate contribution for the prosperity of people in the nearby village.

In order to identify the implementation of CD by PT. Pupuk Kalimantan Timur, this research was done in Guntung. This research was conducted using qualitative method, data collection using questionnaire and interview techniques, to propose model of community development for the people of Guntung.

Generally, it can be said that Bontang society, especially located near the plant those are Guntung and Loktuan feel the benefit by the aids from PT. Pupuk Kalimantan Timur and the positive response.

These aids only make them depend too much on PT. Pupuk Kalimantan Timur's donation and do not empower them.

The researcher propose model of the process of identification, formulation of objectives, condition analysis, proposed policy alternative, preferred alternative, implementation and controll to be done together with people. It is suggested that for executing the problem there should be some representatives from the community to help identifying the problems and finding the solution through SWOT (strength, weakness, opportunity, and threat) components exist in Guntung society. These representatives together with the society arrange program to meet the society's needs by taking care of the environment, not to create dependence and should be sustainable.

Key words : NGOs and community critiques – PT. Pupuk Kalimantan Timur's assistance – proposed genuine community development.

ABSTRAK

Sejak awal berdiri PT. Pupuk Kalimantan Timur telah melakukan program Cd di Guntung, namun demikian masih ada pihak seperti LSM yang mengatakan bahwa program CD PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung belum optimal dan memihak masyarakat tertentu, bahkan dikatakan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur belum banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat Guntung yang merupakan wilayah paling terdekat dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Untuk mengetahui manfaat program CD tersebut bagi masyarakat Guntung, dampak program CD tersebut bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur dan model CD yang sesuai untuk masyarakat Guntung, dilakukan penelitian.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan kualitatif mulai dari tujuan penelitian, pengumpulan data dengan teknik kuesioner dan wawancara dan menyusun model pemberdayaan masyarakat yang sesuai bagi masyarakat Guntung.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Bontang, khususnya yang berada di sekitar pabrik yaitu Guntung dan Loktuan merasakan manfaat dengan adanya bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan responnya positif.

Hasil penelitian suplai air bersih, bantuan dana perbaikan masjid dan bantuan kios, menurut hasil analisis tahapan proses CD yaitu masalah, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, dan implementasi, bahwa suplai air, bantuan dana perbaikan masjid dan bantuan kios dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati, karena proses yang lebih berupa pemberian kepada masyarakat Guntung. Bantuan ini tidak menjadikan masyarakat Guntung berdaya tapi menciptakan ketergantungan kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur. Peran pendamping yaitu tokoh masyarakat belum berperan sebagai pendampingan yang sejati.

Model CD yang disarankan untuk masyarakat Guntung sebaiknya menggunakan frame tujuh langkah, terdiri dari masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan. Dalam pelaksanaannya hendaknya ada pendamping dari masyarakat Guntung yang membantu mengidentifikasi masalah, melakukan analisis kondisi masyarakat berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung serta mencari solusi. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

Kata Kunci : protes masyarakat – bantuan untuk masyarakat – usulan model untuk community development

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Dan Pertanyaan Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pendahuluan	5
2.2. Kemiskinan	5
2.3. Community Development	6
2.4. Model	13
2.5. Teori Perencanaan Pembangunan	13
2.5.1. Teori Perencanaan	13
2.5.2. Pembangunan	13
2.5.3. Pembangunan Berkelanjutan	14
2.5.4. Perencanaan Transaktif dan Pembelajaran Sosial	20
2.6. Program Bina Lingkungan	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Menyusun Rancangan Penelitian	26
3.2. Kerangka Pikir	27

3.3. Ruang Lingkup Penelitian / Aspek-aspek Penelitian	29
3.4. Lokasi Penelitian	29
3.5. Jenis Dan Sumber Data	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30

IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	32
4.2. Sejarah Singkat Kota Bontang	38
4.3. Sejarah Singkat PT. Pupuk Kalimantan Timur	39

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Di Guntung	43
5.2 Pembahasan	61
5.2.1. Analisis Proses CD	62
5.2.2. Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Bagi Masyarakat Guntung	74
5.2.3. Dampak Bantuan Bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur	75
5.2.4. Model Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Di Guntung	76

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan	86
6.2. Saran	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.: Kondisi geografis kelurahan Guntung	34
Tabel 4.2.: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin kelurahan Guntung	35
Tabel 4.3 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan kelurahan Guntung	35
Tabel 4.4 : Jumlah penduduk menurut mata pencaharian kelurahan Guntung.....	36
Tabel 4.5.: Data pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sungai Guntung	48
Gambar 2 : Sungai Guntung	48
Gambar 3 : Tanki Air Bersih Di Guntung	51
Gambar 4 : Tanki Air Bersih Di Guntung	51
Gambar.5 : Masjid Di Guntung	54
Gambar 6 : Bagian Dalam Masjid Guntung	54
Gambar 7 : Kios Pujasera Di Guntung	56
Gambar 8 : Kios Bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Peta Wilayah Guntung
- Lampiran 2 : Salinan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003
- Lampiran 3 : Salinan Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 5 : Koreksi perbaikan tesis
- Lampiran 6 : Biodata Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Di Guntung

PT. Pupuk Kalimantan Timur sesuai rencana jangka panjang masih akan membangun lagi pabrik Ammonia dan Urea untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di dalam negeri. Pada pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur yang menggunakan teknologi tinggi tentu akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar terhadap berbagai komponen lingkungan. Pembangunan bidang industri mempunyai peranan yang positif terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung disamping juga mampu mendatangkan devisa bagi negara. Namun industri juga menghasilkan dampak yang bila tidak dikendalikan dapat menimbulkan akibat yang bersifat negatif, yang pada tingkat tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu dampak sosial dengan adanya kegiatan pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah meningkatnya jumlah penduduk, mengingat industri merupakan salah satu penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdatangan penduduk pencari kerja.

Meningkatnya jumlah penduduk dalam waktu relatif cepat akan membawa berbagai macam pengaruh secara langsung atau tidak langsung yang menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Pengaruh tersebut seperti:

- Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan limbah rumah tangga
- Timbul rasa tidak puas dari penduduk asli/lokal
- Timbulnya masalah kriminalitas
- Menurunnya kualitas estetika, ketidakserasian penggunaan tata ruang
- Menurunnya norma sosial dan tata nilai dalam masyarakat, misal munculnya kedai yang menjual minuman keras.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Keberadaan industri PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak NGL, selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif kepada lingkungan di sekitarnya. Bontang yang semula dalam keadaan terisolir dari daerah lainnya, dengan adanya kedua industri besar tersebut Bontang menjadi lebih terbuka serta meningkatkan perekonomian rakyatnya karena usaha-usaha rumah-rumah sewa / penginapan, dan warung-warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.

PT. Pupuk Kalimantan Timur sejak awal berdirinya mempunyai peranan yang penting dalam ikut memajukan Kota Bontang dan sejak awal berdiri telah melakukan program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development/CD*). Program pemberdayaan masyarakat merupakan kontribusi nyata PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat sekitar secara langsung, sehingga fungsi dan keberadaan PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan *multiplier effectnya* pada masyarakat sekitar terlihat jelas. Semua program *community development* sejak awal dirancang untuk memajukan perkembangan daerah, dalam hal ini di kota Bontang, sekaligus menggali potensi ekonomi masyarakat khususnya di sekitar perusahaan sehingga terwujud kerja sama yang saling menguntungkan.

Program pemberdayaan masyarakat bagi suatu perusahaan mutlak diperlukan dan merupakan kepentingan bersama antara masyarakat dengan keberadaan perusahaan. Dasar hukum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- SK. Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
- SK. Menteri Keuangan No.266/KMK.016/1997 Tanggal 11 Juni 1997.
- SK. Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Komunitas masyarakat yang dilibatkan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam kegiatan Bina Lingkungan, meliputi mereka yang tinggal di daerah penyangga atau *Buffer Zone*, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah Guntung, Sidrap, Loktuan, Bontang Kuala dan Bontang pada umumnya.

Di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur terdapat kekurangan, yaitu belum adanya sinergi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Badak NGL dan Pemerintah Kota Bontang. Masing-masing pihak yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut berjalan sendiri sesuai dengan konsep dan pemikiran masing-masing mengenai Pemberdayaan Masyarakat, sehingga penyaluran dana sering tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.

PT. Pupuk Kalimantan Timur walaupun telah berbuat banyak dengan program pemberdayaan masyarakat di Guntung, namun banyak pihak seperti masyarakat Guntung, Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna yang menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung belum optimal, memihak masyarakat tertentu, bahkan dikatakan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur belum banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat Guntung yang merupakan wilayah paling terdekat dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur..

1.2. Identifikasi Dan Pertanyaan Penelitian

Dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur, pertanyaan penelitian adalah:

- a. Bagaimana manfaat program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur bagi masyarakat Guntung?
- b. Bagaimana dampak program pemberdayaan tersebut bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur?
- c. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk masyarakat Guntung?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur terhadap masyarakat desa Guntung. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manfaat program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur bagi masyarakat Guntung.
- b. Untuk mengetahui dampak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- c. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk masyarakat Guntung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setelah diketahui permasalahan dan tujuan maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan masukan bagi Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini.
- b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bontang tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Guntung.
- d. Mengoptimalkan dana perusahaan untuk pelaksanaan program community development.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pendahuluan, kemiskinan, community development, teori perencanaan pembangunan dan program bina lingkungan.

2.1. Pendahuluan

Tujuan utama kebijaksanaan pembangunan diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketiga masalah ini saling terkait dan tidak dapat dipecahkan secara terpisah.

Masalah tersebut timbul karena sifat dan kemampuan manusia dalam kehidupan tidak sama, sehingga menimbulkan perbedaan di antara setiap anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi, antara yang telah siap dengan yang belum siap, antara yang memiliki faktor produksi dengan tidak memiliki faktor produksi, antara yang berproduktivitas tinggi dengan berproduktivitas rendah dan antara anggota masyarakat di satu daerah dengan daerah lain.

Agar tujuan pembangunan tercapai, harus terpenuhi kriteria:

- a. Mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Kriteria ini mengharuskan bahwa setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha sesuai bidang dan kemampuan masing-masing.
- b. Setiap anggota masyarakat harus mendapatkan imbalan sesuai dengan pengorbanannya, yang berarti yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan.
- c. Adanya tenggang rasa di antara anggota masyarakat yang berarti selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam rasa kebersamaan yang saling menguntungkan.

2.2. Kemiskinan

Secara konseptual kemiskinan dapat dibagi dalam tiga pengertian, yaitu kemiskinan subyektif, absolut/mutlak dan relatif. Kemiskinan subyektif dilandasi ukuran pada dirinya sendiri, yakni membandingkan antara kebutuhan dan keinginan perorangan secara individu. Kemiskinan absolut diukur dengan kebutuhan fisik minimum dengan menggunakan ukuran standard, dan kemiskinan relatif yaitu posisi seseorang relatif terhadap anggota masyarakat lainnya.

Di Indonesia penyebab dari kemiskinan adalah akibat dari kemiskinan struktural karena struktur sosial masyarakat tidak memungkinkan sebagian masyarakat dapat menikmati atau turut menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Sementara itu pada sisi yang lain kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh kemiskinan struktural tetapi berhubungan erat dengan kemampuan dari seseorang memiliki sejumlah asset yang seharusnya ia miliki dan hasilkan dan dapat diperdagangkan.

Faktor *kemampuan* menguasai alat produksi ini yang sering dijadikan cara oleh kelompok lain yang lebih tahu untuk mengambil alih alat produksi. Ketidak mampuan menguasai pemilikan asset serta distribusi pendapatan akan mengakibatkan partisipasi rendah dalam pembangunan, yang pada gilirannya kelompok ini tertinggal dari kelompok-kelompok lain sehingga tercipta bentuk kepincangan. Pada kenyataannya sering dikatakan bahwa kelompok masyarakat ini kurang berpartisipasi pada pembangunan.

2.3. Community Development

Hadi (2001,1), didalam paper-nya **Comparative Analysis of Community Development: Developed And Developing Countries**, *community development* atau pemberdayaan masyarakat untuk selanjutnya disebut *CD*, adalah strategi untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Sebelum mendefinisikan pengertian *community development*, adalah penting untuk mengetahui masing-masing pengertian *community* dan *development*. “Community” secara konvensional adalah sekelompok orang yang hidup berdekatan secara geografis. “Development” adalah proses untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat dengan peran serta aktif dan

mendasarkan inisiatif masyarakat seoptimal mungkin. Menurut **Christenson (1989)** *community development* adalah sekelompok orang yang melakukan perubahan sosial untuk merubah ekonomi mereka. Menurut **Head (1979)** *community development* adalah partisipasi langsung oleh masing-masing individu dan kelompok didalam membuat keputusan. **Hadi (2001,6)** menyarankan empat pendekatan untuk memahami pengertian *community development / CD*, yaitu:

1. *Community development* sebagai suatu proses
2. *Community development* sebagai suatu metode
3. *Community development* sebagai suatu program
4. *Community development* sebagai suatu penggerak

1. *Community development* sebagai suatu Proses – Tahapan interaksi sosial dan psikologikal yang terjadi pada masyarakat.

CD adalah proses perubahan masyarakat dari suatu kondisi atau keadaan tertentu menuju kondisi yang lebih baik. Beberapa orang atau sekelompok masyarakat membuat suatu keputusan perubahan yang berkenaan dengan mereka sendiri untuk menuju kondisi yang lebih makmur. Perubahan dari suatu kondisi kerja sama minimum menuju kondisi kerja sama maksimum. Perubahan dari kondisi dimana semula hanya beberapa orang berpartisipasi menjadi banyak orang berpartisipasi. Perubahan kondisi dimana seluruh sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut datang dari luar lingkungan mereka menuju kondisi dimana masyarakat tersebut mengusahakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka sendiri.

2. *Community development* sebagai suatu Metode - Upaya untuk mencapai tujuan.

Yaitu upaya/cara kerja yang dilakukan sehingga berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dari Pemerintah seperti perubahan hukum atau peraturan atau upaya masyarakat lokal terhadap perubahan pendidikan merupakan metode *CD* yang membawa perubahan yang diinginkan pada suatu proses. Keberhasilan tergantung pada prinsip keadilan yang membawa masyarakat lokal menuju kepada keadaan yang menguntungkan.

3. *Community development* sebagai suatu Program – Prosedur aktivitas

CD adalah sekumpulan prosedur yang mengandung daftar aktivitas *CD* yang berkaitan dengan kesehatan, kemakmuran, industri, rekreasi, dan lain-lain.

4. *Community development* sebagai suatu Penggerak – Komitmen dan dinamika emosi.

CD adalah suatu pelopor, yang menggerakkan masyarakat setempat untuk berbuat, turut berpartisipasi. *CD* tidak netral seperti halnya *proses*, tapi menggerakkan emosi sehingga masyarakat setempat bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang mereka sendiri.

Tujuan utama program *CD* menurut Hadi (2001) adalah untuk mengembangkan kemampuan dari suatu masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Program *CD* sebenarnya bertujuan untuk:

- Mengangkat masyarakat yang miskin akibat tergusur oleh kegiatan proyek, dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.
- Merealisasi keadilan distributif
- Meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata

Menurut Cox (1993), tujuan *community development* adalah memberantas kemiskinan, merealisasi keadilan distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Sasaran program *CD* adalah meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat khususnya masyarakat miskin / tertinggal. *CD* sifatnya fungsional, yaitu mendorong masyarakat menjadi swakarsa.

CD adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk dapat:

- Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada pada masyarakat.
- Menganalisis keadaan masyarakat, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat tersebut.
- Memilih alternatif kebijakan.

- Mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari luar hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Program CD diharapkan dan selayaknya dapat memberikan hasil akhir berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta peningkatan kelestarian lingkungan. Program CD harus sesuai dengan latar belakang mereka sendiri.

Program CD yang tidak integrated dan tidak mengakomodasi potensi masyarakat adalah seperti yang terjadi di industri refinery minyak di Pangkalan Brandan dan Sanga-sanga, dimana setelah sumber minyak berkurang atau habis, kota Pangkalan Brandan dan kota Sanga-sanga menjadi kota mati. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat tergantung pada bantuan kemasyarakatan dari industri. Masyarakat tidak berusaha meningkatkan kemampuan mereka sendiri dan bersikap menunggu program dari industri tersebut.

CD pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Dasar 1945 yang isinya memihak kepada rakyat. Pasal 33 UUD'45 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil makmur. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sering kali tidak berhasil memenuhi sarannya. Hal ini disebabkan industri/perusahaan yang memberikan bantuan program tersebut melupakan faktor kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang diberikan seringkali berupa sumbangan dalam bentuk jadi, sehingga akibatnya tidak

ada peran aktif dari masyarakat untuk mengembangkan dirinya sendiri. Program pemberdayaan masyarakat seharusnya berbentuk pembinaan yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya masyarakat sehingga pemberdayaan dapat terus berlangsung bahkan hingga setelah perusahaan sudah tidak mampu lagi memberikan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat atau CD diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih baik.

Fokus *community development* menurut Hadi (2001), dilihat dari aspek geografi, terdiri dari:

1. Tingkat community

Fokusnya adalah untuk membantu masyarakat yang tertinggal. CD pada awal mulanya dilakukan pada sekelompok masyarakat yang tertinggal. Pelaksanaan program CD pada sekelompok masyarakat tersebut ada yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau menerapkan program-program yang telah dilakukan pada sekelompok masyarakat di tempat lain, dan pada masyarakat lokal tersebut dapat diterima sesuai kondisi mereka. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat difokuskan pada sumber daya sekelompok masyarakat. Tokoh/pemimpin masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, walaupun masyarakat dapat memanfaatkan keahlian dari orang luar sebagai konsultan yang dapat mempercepat proses CD.

2. Regional

Fokusnya yang berkaitan dengan masalah yang pada umumnya mempengaruhi masyarakat banyak dan di luar sumber daya masyarakat. Penekanannya adalah pada tersedianya bantuan beberapa orang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, yang dapat membantu pelaksanaan program CD untuk sementara waktu pada masyarakat lokal.

3. Nasional

Fokus ini adalah pada keinginan bangsa untuk membawa negara lebih maju dalam bidang teknologi.

Tipe-tipe fasilitator menurut Hadi (2001) di dalam program *community development* terdiri dari:

1. Pemimpin masyarakat lokal:

Tipe fasilitator program *community development* ini adalah pemimpin masyarakat lokal, yaitu pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokrasi atau mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, sehubungan dengan pelaksanaan program *community development*. Masyarakat percaya atas kemampuannya dan dianggap mampu untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Sifatnya sukarela dan tidak dibayar. Tingkatnya bervariasi dari pemimpin masyarakat lokal hingga orang yang telah mendapatkan pelatihan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Banyak program CD yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang hanya mendapat sedikit bantuan dari pihak luar. Dukungan dari masyarakat lokal adalah respon pada kebutuhan yang jelas bahwa anggota masyarakat mengakui dan bersedia untuk melakukan sesuatu.

2. Penduduk lokal yang memiliki keahlian:

Tipe fasilitator program *community development* ini adalah penduduk lokal yang memiliki keahlian memperkenalkan program CD seperti peningkatan pendidikan, kesejahteraan sosial, pertanian, kesehatan. Pada umumnya tipe ini harus bekerja dengan membentuk panitia, dimana anggotanya berasal dari masyarakat lokal itu sendiri. Panitia tersebut bertanggung jawab untuk mengatur keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tergantung pada tingkat keahlian dan kemampuan dari pemimpin dan seluruh anggota panitia tersebut untuk bekerja sama.

3. Profesional dari Luar:

Tipe fasilitator program *community development* ini adalah seorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal. Pada umumnya seorang profesional yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memperkenalkan program pemberdayaan masyarakat. Tipe fasilitator ini pada umumnya hanya menjadikan kesejahteraan masyarakat bersifat sementara, karena tipe fasilitator ini lebih memperhatikan kepada yang menugaskannya atau sponsor, tapi kurang atau bahkan tidak untuk kepentingan masyarakat lokal itu sendiri.

4. Pekerja CD Serba Bisa:

Tipe fasilitator program *community development* ini adalah seorang ahli *community development* yang diundang atau dikirim ke masyarakat lokal untuk membantu menyelesaikan proyek *community development*. Pada umumnya tipe fasilitator ini tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibantunya. Kegiatannya untuk memberi pelatihan kepada pemimpin lokal untuk dapat mampu mengerjakan sendiri pekerjaannya didalam masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Menjalankan pendekatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Banyak program donor, baik bilateral maupun multilateral dan program-program lembaga non-pemerintah (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berhasil memperkenalkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat selama sekian waktu lamanya. Program ini secara umum berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan dan perilaku di tingkat kelompok tani. Terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan

kelembagaan dalam menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil, antara lain :

- Terbatasnya komitmen dan pemahaman para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pendekatan pemberdayaan masyarakat
- Hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal
- Penyusunan kebijakan rinci menghambat timbulnya kreativitas lokal.
- Kekurangan data monitoring dan evaluasi
- Masih adanya struktur pemerintahan dan proses perencanaan yang bersifat membatasi.

2.4. Model

Model adalah suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan suatu gejala atau proses. Model dapat dikelompokkan menjadi model kuantitatif, model kualitatif dan model ikonik. Model kuantitatif adalah model yang berbentuk rumus-rumus matematik, statistik, atau komputer. Model kualitatif adalah model yang berbentuk gambar, diagram, atau matriks, yang menyatakan hubungan antar unsur. Dalam model kualitatif tidak digunakan rumus-rumus matematik, statistik, atau komputer. Model ikonik adalah model yang mempunyai bentuk fisik sama dengan barang yang ditirukan, meskipun skalanya dapat diperbesar atau diperkecil. Dengan model ikonik tersebut dapat diadakan percobaan untuk mengetahui perilaku gejala atau proses yang ditirukan.

2.5. Teori Perencanaan Pembangunan

Uraian pada sub bab ini diawali dengan teori perencanaan dan pembangunan kemudian diikuti dengan uraian tentang perencanaan transaktif atau pembelajaran sosial.

2.5.1. Teori Perencanaan

Menurut **Hadi (2001)** dikatakan teori perencanaan didefinisikan sebagai cara-cara untuk menghubungkan antara dunia ilmiah dengan pengetahuan teknis untuk diimplementasikan dalam dunia publik (masyarakat). Tugas spesifik adalah membuat pengetahuan ilmiah dan teknis yang berguna bagi para pelaku di dunia publik.

Pengertian perencanaan mengalami sebuah evolusi. Friedman mengidentifikasi dua perbedaan perspektif perencanaan, yaitu:

Pertama, perencanaan mencoba untuk membuat link antara dunia ilmiah dengan pengetahuan teknis untuk menciptakan pedoman sosial. Pedoman sosial secara implisit memandang perlunya keterlibatan sentral dari negara dan mengakomodasi bentuk-bentuk alokasi dan inovasi dari perencanaan. Teori-teori yang berkaitan dengan perspektif ini adalah neo-klasik, institusi ekonomi, administrasi publik dan pengembangan organisasi.

Kedua, perencanaan mencoba untuk membuat link antara dunia ilmiah dengan pengetahuan teknik untuk memproses transformasi sosial. Gagasan ini datang dari teori Marxis dan Anarkis dan dari tradisi Utopia.

2.5.2. Pembangunan

Pembangunan memiliki makna ganda, yaitu:

Tipe pertama, lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya.

Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe ini lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat. Esensinya adalah bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah mereka, mengatasi masalah-masalah mereka dan belajar dari masalah-masalah mereka. Pendekatan partisipatif merupakan inti dari konsep pembangunan yang kedua ini.

2.5.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma baru yang masih perlu terus dicari bagaimana operasionalisasinya. Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan (WCED) yang pertama kali menggulirkan pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maka ada empat prinsip dalam mencapai pembangunan yang harus dipenuhi yang meliputi:

- pemenuhan kebutuhan manusia (fulfillment of human needs)
- memelihara integritas ekologi (maintenance of ecological integrity)
- keadilan sosial (social equity)
- kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination)

Empat komponen yang diajukan Jacobs dkk (1987), diperinci sebagai berikut:

a. pemenuhan kebutuhan dasar:

- kebutuhan materi
- kebutuhan non-materi

b. pemeliharaan lingkungan:

- konservasi
- mengurangi konsumsi

c. keadilan sosial:

- keadilan masa depan
- keadilan masa kini

d. kesempatan menentukan nasib sendiri:

- masyarakat mandiri
- partisipatori demokrasi

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yang disebut kebutuhan kebutuhan materi termasuk di dalamnya sandang, pangan dan papan. Kebutuhan non-materi meliputi rasa aman, hak asasi manusia, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat. Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Hal ini sejalan

rumusan UNDP (1997:1) yang mendefinisikan *human development as expanding the choices for all people in society. This means that men and women particularly the poor and vulnerable- are at the centre of the development process*. Nampak bahwa fokus perhatian terhadap kaum papa (miskin) menjadi sangat esensial. Kerusakan lingkungan seperti menipisnya tanaman balau, terumbu karang, erosi tanah, abrasi pantai dan sedimentasi, kerusakan lahan di beberapa daerah penambangan disebabkan oleh rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tanaman bakau ditebang untuk kayu bakar, terumbu karang dieksploitasi untuk fondasi bangunan, lahan konservasi dibuka untuk daerah pertanian. Rusaknya lingkungan juga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan. Misalnya kondisi laut yang sudah *over fishing*, daerah bekas penambangan yang telah rusak seperti di Hampalit, Kalimantan Tengah, kawasan industri yang *Polluted*, hutan yang telah rusak seperti di Kalimantan dan Riau dan sebagainya.

Kebutuhan non-materi yang telah dicerminkan dalam susana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of the process*.

Kebutuhan non-materi ini terkait erat dengan komponen keempat yakni partisipatori demokrasi.

b. Pemeliharaan Lingkungan

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, prinsip yang pertama adalah konservasi maksudnya adalah perlindungan lingkungan. Lingkungan, baik sebagai sumber daya maupun ruang harus dilindungi, karena keterbatasan daya

dukung. Jika sumber daya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Setiap usaha/ kegiatan harus di atur agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sebagai ruang. Prinsip b ini sebenarnya sangat terkait dengan prinsip a, dimana kerusakan lingkungan akan menghambat pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan telah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat di daerah bekas penambangan, daerah industri yang heavy polluted, sungai yang polluted yang tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia bahkan menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Negara-negara maju yang jumlah penduduknya hanya sepertiga penduduk dunia tetapi konsumsi energinya mencapai dua pertiga konsumsi energi dunia. Di negara-negara berkembang, yang terjadi adalah sebaliknya. Jumlah penduduknya mencapai dua pertiga penduduk dunia tetapi konsumsi energinya hanya sepertiga. Dalam konteks ini para pakar lingkungan menjuluki negara maju sebagai *high consumption countries*, sedangkan negara berkembang *less consumption countries*. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di negara maju maupun negara berkembang agar mengurangi beban bumi. Seperti diketahui, menurut temuan UNEP (1995) pencemaran udara di Jakarta yang menempati urutan ketiga setelah kota Mexico dan Bangkok 70% disumbang oleh emisi bergerak (kendaraan bermotor). Pemecahan utamanya seharusnya merubah pola berkendara dari pribadi ke umum atau berkelompok (car pool). Sampah yang merupakan salah satu persoalan pelik di perkotaan hanya bisa dipecahkan jika ada perubahan pola konsumsi barang-barang yang non-plastic dan less waste. Wackernagel (1997) dalam penelitiannya yang dituangkan dalam laporan berjudul *Ecological Footprints of Nations* menemukan bahwa pada tahun 1996, konsumsi sumber

daya alam penduduk di 52 negara yang merupakan 80% penduduk dunia telah melebihi sepertiga kemampuan alam untuk memulihkannya. Pada tahun 1992 over consumption baru mencapai seperempat dari kemampuan alam untuk memulihkan. Persoalan lingkungan yang dipicu oleh pola konsumsi dalam bentuk pencemaran dan kemacetan lalu lintas diperkotaan akan memicu keberingasan sosial, sikap yang tidak saling menenggang.

Dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar seperti Jakarta (Bantargebang), Surabaya (Keputih, Sukolilo), Semarang (Jatibarang), dan bahkan menjurus menjadi konflik vertikal. Resistansi terhadap TPA oleh penduduk lokal telah menjadi fenomena umum. Dalam konteks pemecahan persoalan sampah, maka perubahan pola konsumsi merupakan merupakan salah satu pendekatan yang harus mulai dilakukan.

c. Keadilan Sosial

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam pembangunan. Tanpa pemerataan akan menimbulkan ketimpangan sebagaimana yang terjadi pada pembangunan di era Orde Baru di mana yang menikmati hasil pembangunan hanya sekelompok kecil masyarakat. Keadilan masa kini juga berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Keinginan memisahkan diri pada daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Riau, Aceh, Irian Jaya menjadi indikasi adanya perasaan diperlakukan tidak adil atas pengalokasian sumberdaya alam.

Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) atas sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Komitmen untuk melindungi ekosistem itu sebenarnya harus tertuang dalam prinsip berbangsa dan bernegara yakni pada UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini baru menyiratkan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (pro jobs, pro people) tetapi tidak menyiratkan perlunya dipergunakan secara rasional agar tidak merusak tata lingkungan hidup (pro nature). Karena itu amandemen UUD 1945 harus memasukkan klausul perlunya perlindungan terhadap fungsi lingkungan.

d. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dua partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (self reliant community) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi disekitar mereka. Seperti diketahui, ketidakpuasan pada pemerintah pusat yang diekspresikan dalam bentuk keinginan untuk memisahkan diri, protes dan demonstrasi dipicu oleh pola pengambilan keputusan yang otokratis, sentralis dan top down. Ruang untuk dialog yang mempertemukan keinginan masyarakat (daerah) dengan para pengambil keputusan hampir tidak ada, karena katup-katup demokrasi ditutup.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, akan bisa terwujud jika didukung oleh Pemerintahan yang baik (good governance). Governance dikategorikan sebagai baik jika sumber-sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance sebagaimana dirumuskan oleh ICEL (1999) mempersyaratkan lima hal:

1. lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat (effective representative system)

2. pengadilan yang mandiri, bersih dan profesional (judicial independence)
3. birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki integritas (reliable and responsive bureaucracy)
4. masyarakat sipil yang sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol (strong and participatory civil society). Masyarakat yang partisipatif yang dicerminkan dalam bentuk public pressure akan membantu penegakan hukum lingkungan.
5. desentralisasi dan lembaga perwakilan yang kuat (democratic decentralization)

2.5.4. Perencanaan Transaktif dan Pembelajaran Sosial

Kunci dari gagasan perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial didalam buku Hadi (2001) adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Friedman yang dikutip dari Hudson (1979:389), perencanaan bukan sesuatu yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial (social action) tetapi merupakan proses yang terkait didalam evolusi yang terus-menerus dari gagasan melalui tindakan. Dalam konteks ini, perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Para penganut teori ini percaya bahwa melalui dialog, perencana dapat menjembatani teori dengan praktek untuk membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, menurut Burchel (1988:5) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengetahuan (teori) dalam praktek dan teori selalu diperkaya dari pelajaran di lapangan. Tujuan dari dialog adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal atau non-hierarchical. Peran perencana lebih sebagai fasilitator atau pendamping.

Menurut Friedman (1973:1) perencanaan transaktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani communication gap antara pengetahuan teknik dari para perencana dengan pengetahuan keseharian dari masyarakat. Jarak antara perencana yang memiliki pengetahuan yang telah dikodifikasi (processed knowledge) dan masyarakat (clients) yang mendasarkan pada pengalaman keseharian semakin dekat. Penciptaan bentuk komunikasi yang baik bukan hanya persoalan menterjemahkan bahasa simbolik dan abstrak kedalam bahasa yang sederhana. Solusi yang baik adalah merestrukturisasi hubungan mendasar antara perencana dengan para klien (masyarakat). Dalam dialog, perencana dan klien saling belajar. Perencana belajar tentang pengetahuan keseharian, sedang klien belajar tentang pengetahuan teknis. Citra tentang sesuatu yang umum berkembang melalui dialog. Pemahaman baru tentang kemungkinan adanya perubahan ditemukan melalui dialog. Perencanaan transaktif, menurut Friedman, adalah metode yang paling cocok untuk memadukan antara pengetahuan ilmiah dan teknis dengan pengetahuan personal/keseharian. Dalam proses interaksi ini, perencana dapat bertindak sebagai guru atau pendidik. Ia menyederhanakan perencanaan dan pengetahuan teknis dalam bahasa klien.

Menurut Lawrence Susskind (1984:5), tanggung jawab dari perencana sebagai teknisi telah diperluas termasuk mengkaji konsekwensi dari adanya berbagai alternatif perencanaan. Pengambilan keputusan disektor publik pada umumnya ditentukan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Sangat sering keputusan yang dibuat tidak mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Situasi ini nampak di Indonesia sekarang ini dimana elite yang berada di legislatif dan eksekutif sering terlibat konflik yang cenderung saling menjatuhkan. Perencanaan transaktif dapat didayagunakan sebagai media dalam mana perencanaan dapat bertindak sebagai mediator. Fungsi mediator adalah memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada interest termasuk interest dari masyarakat. Pencapaian kesepakatan melalui forum mediasi (perundingan) merupakan strategi yang baik karena akan membuahkan hasil yang win-win. Kesepakatan akan ditaati oleh para

pihak karena mereka merasa sebagian dalam perundingan. Forum perundingan pada umumnya didayagunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang lazim disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan media penyelesaian konflik yang mendasarkan pada interest (kepentingan) dan bukan power (kekuatan, kekuasaan) atau right base (benar salah) melalui jalur pengadilan.

Proses pembelajaran dalam model ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

Pertama, pembelajaran termanifestasi dengan sendirinya sebagai suatu perubahan dalam aktivitas praktis. Pelajaran termanifestasi merupakan perubahan yang simpel dalam taktik dan strategi dari tindakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Kedua, pembelajaran sosial mungkin menimbulkan perubahan di kalangan para pencetus gagasan untuk mendorong, membimbing dan membantu mereka yang terlibat dalam perencanaan dalam proses perubahan. Para pencetus gagasan harus mengembangkan hubungan yang transaktif dengan para kliendalam suasana yang kondusif. Pembelajaran sosial memerlukan penyesuaian dari norma-norma yang mengarahkan pada proses tindakan dan perubahan dalam realitas, teori, nilai dan kepercayaan pada pelaku.

Ketiga, pembelajaran sosial terdiri dari jalur tunggal dan ganda.

Perencanaan partisipatori secara historis dikembangkan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1960-an. Perspektif partisipatori ditujukan untuk mencapai proses yang adil dari pembangunan dengan memberdayakan masyarakat untuk turut menentukan.

Perencanaan partisipatori tentu saja agak sulit untuk memenuhi kriteria kelayakan yang didasarkan atas data dan analisis yang baik sekaligus dapat mengamodasi aspirasi, gagasan dari masyarakat yang akan terpengaruh oleh suatu keputusan. Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, perencanaan transaktif menjadi media yang dicita-citakan untuk didayagunakan. Tuntutan reformasi adalah transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Yang disebut terakhir menuntut adanya keikutsertaan masyarakat

dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Iklim demokrasi sebenarnya telah didorong oleh keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan kritik. Sayangnya keinginan itu kadang-kadang sangat ekspresif dan berlebihan, sehingga sering disebut sebagai *kebablasan*.

2.6. Program Bina Lingkungan

Salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat adalah program bina lingkungan. Program bina lingkungan di PT. Pupuk Kalimantan Timur mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Menteri BUMN menimbang bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

Menteri BUMN menimbang bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Bab I Pasal 1:

1. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Unit Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.

3. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program BL.

Berdasarkan Bab III Pasal :

1. Dana program BL bersumber dari:
 - Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen)
 - Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program BL.
2. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.

Menurut Bab III Pasal 10 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dari Kep. Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003:

Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk:

- a. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, terdiri dari:
 - Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.
 - Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis.
 - Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara.
 - Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari:
 - Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.
 - Bantuan biaya pendidikan/beasiswa.
 - Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah.
 - Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- c. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terdiri dari:
 - Renovasi balai pengobatan masyarakat.

- Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:
 - Rehabilitasi prasarana pendidikan.
 - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.
 - Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.
- e. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, terdiri dari:
 - Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah.
 - Pengadaan perlengkapan ibadah.
 - Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Menurut Bab IV, pasal 12:

Tata cara penyaluran dana Program BL:

- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat.
- b. Pelaksanaan program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Bab IV, pasal 14:

1. Beban operasional Program Bina Lingkungan dibiayai dari dana Program Bina Lingkungan.
2. Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3% (tiga persen) dari dana Program Bina Lingkungan yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan.

Bab IV, pasal 16:

BUMN Pembina dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang menyusun rancangan penelitian, kerangka pikir, ruang lingkup penelitian/aspek-aspek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan teknik pengambilan dan pengumpulan data.

3.1 Menyusun Rancangan Penelitian

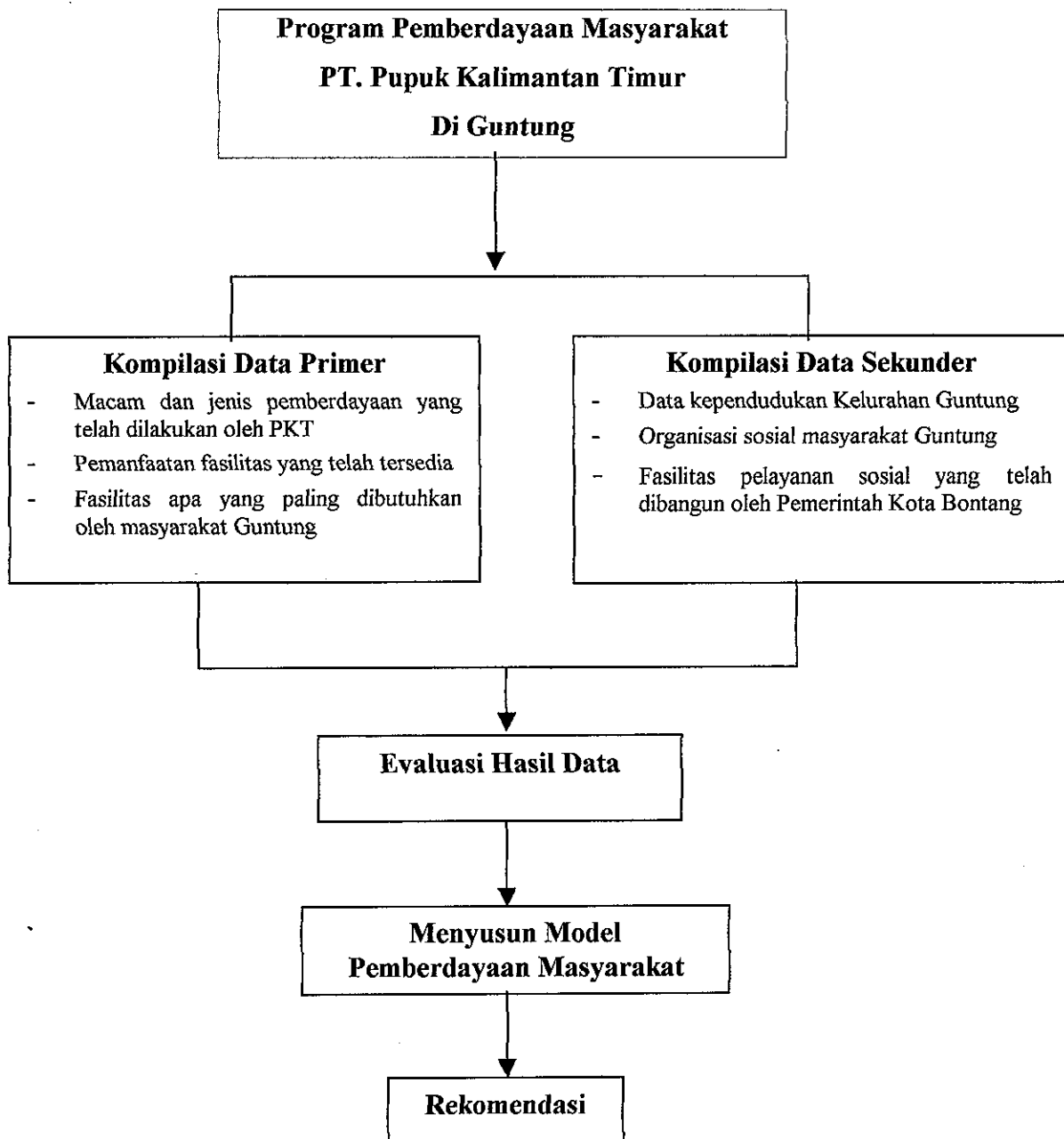
Tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian menggunakan rancangan kualitatif mulai dari tujuan penelitian, mengumpulkan data dengan teknik kuesioner, wawancara dan observasi serta membuat model pemberdayaan masyarakat yang sesuai bagi masyarakat Guntung.

Kerangka penelitian dilakukan agar langkah-langkah penelitian dapat dilakukan secara tepat dan runut, dimulai dengan melakukan pengumpulan data primer dari pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai pemberi bantuan program pemberdayaan masyarakat, dan pihak masyarakat Guntung sebagai penerima bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, pengumpulan data sekunder dari Kelurahan Guntung, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan kajian teori pemberdayaan masyarakat, dan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dibuat model pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian ini yang akan direkomendasikan kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang.

3.2 Kerangka Pikir

Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun langkah-langkah penelitian seperti yang diuraikan diatas adalah melalui blok diagram pendekatan penelitian sebagai berikut :

KERANGKA PIKIR



Uraian Pendekatan Penelitian :

3.2.1. Kompilasi Data Primer

Melakukan pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Pengumpulan data dari hasil wawancara dan kuesioner dengan pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur mengenai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perusahaan tersebut kepada masyarakat Guntung.
- b. Pengumpulan data dari hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat Guntung atas pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada mereka.
- c. Pengumpulan data dari hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat Guntung, tentang hal yang paling mereka butuhkan di Guntung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

3.2.2. Kompilasi Data Sekunder

- a. Pengumpulan data dari Kelurahan Guntung mengenai fasilitas-fasilitas pelayanan sosial yang telah dan akan diberikan kepada masyarakat Guntung.
- b. Pengumpulan data dari Kelurahan Guntung mengenai data kependudukan Guntung dan organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat.

3.2.3. Evaluasi Terhadap Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi.

3.2.4. Penyusunan Model Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya dari hasil evaluasi disusun model pemberdayaan masyarakat yang sesuai bagi masyarakat Guntung.

3.2.5. Rekomendasi

Memberikan rekomendasi dan usulan dari hasil kajian kepada pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tentang program pemberdayaan masyarakat Guntung.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian / Aspek-aspek Penelitian

Parameter yang diteliti meliputi:

- Macam dan jenis program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat Guntung.
- Manfaat program tersebut bagi masyarakat Guntung.
- Macam dan jenis program pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Guntung.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Guntung, Bontang, Kalimantan Timur, yang lokasinya terdekat dari PT. Pupuk Kalimantan Timur.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1 Pengambilan data sekunder dari Kelurahan Guntung berupa:

- Data kependudukan berupa angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi penduduk.
- Fasilitas pelayanan sosial (baik yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang atau program pemberdayaan PT. Pupuk Kalimantan Timur) yang tersedia di Guntung, dibangun kapan dan oleh siapa, pemanfaatannya oleh masyarakat Guntung hingga sekarang, jumlahnya, kecukupan fasilitas-fasilitas tersebut serta umur fasilitas tersebut.
- Organisasi sosial masyarakat di Guntung.

3.5.2 Pengambilan data primer berupa wawancara dengan pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur berupa:

- Macam, jenis dan jangka waktu program pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan kepada masyarakat Guntung.

3.5.3 Pengambilan data primer berupa kuesioner, wawancara dan observasi dengan masyarakat Guntung berkaitan dengan:

- Pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial yang tersedia di Guntung.
- Fasilitas pelayanan sosial yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Guntung.
- Macam, jenis dan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari PT. Pupuk Kalimantan Timur yang diterima oleh masyarakat Guntung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur didasari bahwa nara sumber adalah pihak yang paling mengetahui tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sedangkan kepada pihak masyarakat Guntung adalah pihak yang paling mengetahui apa yang telah diterima dari bantuan program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara menggunakan pedoman pertanyaan dan daftar pertanyaan sebagai panduan yang digunakan untuk menghimpun data dari tokoh masyarakat Guntung serta pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur.

- Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mendatangi kantor Kelurahan Guntung.
- Data primer dikumpulkan berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan nara sumber yaitu:

Pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai pemberi bantuan program pemberdayaan masyarakat. Data yang dikumpulkan dari pihak perusahaan yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang telah dan akan dilakukan, jumlah dan jenis program pemberdayaan, dasar hukum baik berupa Keputusan Menteri atau Kebijakan Pemegang Saham dan Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk program pemberdayaan.

Pihak masyarakat Guntung sebagai penerima program pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari Kepala Lurah, Tokoh Masyarakat, Penduduk asli Guntung, penduduk Guntung yang bekerja di PT. Pupuk Kalimantan Timur, penduduk pendatang, dan penduduk Guntung lainnya seperti pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta dan wiraswasta yang diambil secara acak. Wawancara dilakukan kepada penduduk asli Guntung untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi sungai Guntung sebelum tercemar dengan limbah domestik perumahan Housing, proses suplai air bersih dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, kondisi masjid Guntung dan pedagang kaki lima. Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi langsung ke wilayah Guntung untuk mengetahui keadaan masyarakat Guntung, kondisi sungai Guntung, kondisi masjid dan pedagang kaki lima.

Data yang dikumpulkan dari pihak masyarakat Guntung yaitu bantuan dari PKT dan pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat, jumlah dan macam program pemberdayaan yang telah diterima, manfaat program pemberdayaan tersebut, pembangunan fasilitas sosial yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Bontang, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh masyarakat Guntung untuk kesejahteraan dan memajukan masyarakat Guntung.

Pemilihan nara sumber pihak penerima di Guntung seperti Kepala Lurah, Tokoh masyarakat Guntung dan penduduk asli Guntung karena mereka lebih mengetahui sejarah Guntung sejak berdirinya PT. Pupuk Kalimantan Timur, apa saja kontribusi dan peran perusahaan tersebut kepada desa mereka dan dampak berdirinya PT. Pupuk Kalimantan Timur. Pemilihan nara sumber penduduk pendatang baik yang bekerja di PT. Pupuk Kalimantan Timur atau di luar adalah untuk mendapatkan data tambahan karena mereka dapat memberikan masukan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Guntung. Penduduk pendatang sebagian besar berasal dari Jawa dan Sulawesi yang mempunyai sudut pandang berbeda dengan penduduk asli untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Guntung.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, sejarah singkat kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Wilayah Guntung merupakan bagian dari wilayah kelurahan Guntung. Kelurahan Guntung terdiri dari wilayah Guntung dan wilayah Sidrap. Letak geografis wilayah Guntung bersebelahan dengan laut selat Makasar dan berada di sebelah barat wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur. Wilayah Guntung merupakan wilayah yang terdekat dengan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Wilayah Guntung dilalui oleh sungai Guntung, sehingga di tepi sungai Guntung banyak dibangun rumah yang memanjang mengikuti alur sungai Guntung.

Bontang dulunya merupakan suatu Kecamatan kecil, sepi dan terisolir dengan jumlah penduduk sangat sedikit, dengan sumber penghidupan penduduknya terutama mengandalkan hasil penangkapan ikan di laut dan bertani. Akan tetapi sejak ditemukan sumber gas alam sekitar tahun 1970-an, wajah Bontang secara berangsur-angsur berubah, secara perlahan berkembang sebagai kota industri. Salah satu wilayah yang menjadi pusat aktivitas di Bontang adalah wilayah Guntung yang bersebelahan dengan lokasi pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Pada saat awal berdirinya pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur, sebagian karyawannya dan pekerja konstruksi tinggal di desa tersebut. Penduduk asli Guntung lebih banyak bekerja sebagai petani dan nelayan, namun dengan adanya kegiatan proyek pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur, banyak diantara penduduk asli desa Guntung yang terlibat dalam kegiatan proyek. Mereka sebelum bergabung dengan kegiatan proyek mendapat pelatihan sebagai tukang las, sopir, tukang kayu, penjahit dan perbengkelan. Kegiatan pelatihan dimulai sejak tahun 1977 dan keikutsertaan peserta baik secara langsung maupun tidak langsung berkisar antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kegiatan proyek secara langsung seperti misalnya tukang las, tukang kayu dan perbengkelan, sedangkan kegiatan proyek secara tidak langsung antara lain sebagai penjahit dan sopir. Sebagian dari mereka ada yang direkrut sebagai karyawan tetap PT. Pupuk

Kalimantan Timur dan sebagian lagi memilih tetap sebagai tenaga kontraktor karena saat itu gaji tenaga kontraktor jauh lebih besar dibanding sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Sebagian besar masyarakat Guntung tinggal di rumah yang terbuat dari batu, dan sebagian lainnya tinggal di rumah yang masih terbuat dari kayu. Masyarakat Guntung membuang sampah rumah tangga ke tempat pengumpulan sampah yang terdapat di Guntung, dan selanjutnya sampah tersebut dibawa oleh truk sampah ke TPA, walaupun ada juga diantara mereka yang membakar dan menimbun sampah yang umumnya berupa daun-daun.

Hampir seluruh masyarakat Guntung mengatakan bahwa tempat tinggal di Guntung menyenangkan, nyaman dan aman. Kemananan di wilayah Guntung aman dan terkendali.

“ Saya datang ke Bontang sekitar tahun 1982 dan tinggal di Guntung. Pada awalnya saya kost. Tahun 1988 saya nikah di Surabaya dan kemudian istri saya boyong ke Bontang. Kami mengontrak sebuah rumah. Istri saya merasa nyaman tinggal di Guntung. Saya bekerja sebagai tenaga kerja harian di KNE. Pada tahun 1991 saya kembali ke Surabaya karena di PHK akibat kelebihan tenaga kerja. Tapi kemudian tahun 1993 saya dipanggil lagi untuk bekerja. Saya sekeluarga kembali ke Bontang dan tinggal di daerah Loktuan. Istri saya merasa tidak kerasan dan nyaman tinggal di Loktuan dan meminta untuk pindah ke Guntung. Kami hanya bertahan tinggal di Loktuan sekitar 7 bulan saja, selanjutnya pindah ke Guntung” (Suw, 47 tahun)

Hubungan sosial di Guntung cukup baik. Hal ini ditunjukkan:

- jika ada kematian, masyarakat Guntung turut serta membantu keluarga yang berduka hingga mengantar ke pemakaman.
- aktifitas kegiatan arisan ibu-ibu masyarakat Guntung
- jika ada kegiatan perkawinan, para pemuda saling membantu.
- adanya kegiatan kerja bakti membersihkan jalan dan parit.

4.1.1. Kondisi Geografis Dan Demografis Kelurahan Guntung

Kelurahan Guntung diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002, dan kelurahan Guntung termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Utara. Kelurahan Guntung merupakan pemekaran Kelurahan Belimbing dengan batas-batas wilayah:

- sebelah Utara dengan Kabupaten Kutai Timur
- sebelah Selatan dengan Kelurahan Lok Tuan
- sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Timur
- sebelah Timur dengan Selat Makasar

Data kelurahan Bontang sebagai berikut:

- a. Luas kelurahan : ± 849 Ha

Kelurahan Guntung meliputi wilayah Guntung dan wilayah Sidrap. Sebagian wilayah Guntung masih berupa rawa dan hutan.

- b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 32

Sebanyak 18 RT berada di wilayah Guntung, dan 14 RT berada di wilayah Sidrap.

- c. Kondisi Geografis:

Tabel 4.1. Kondisi Geografis Kelurahan Guntung

No.	Kondisi Geografis	Data
1.	Ketinggian tanah dari permukaan laut	0 s/d 5 M
2.	Banyaknya curah hujan	Sedang
3.	Topografi	Dataran rendah
4.	Suhu udara rata-rata	28° ~ 35° C

Sumber: Kantor kelurahan Guntung, tahun 2004

Dari tabel 4.1. di atas tampak bahwa wilayah Guntung merupakan dataran rendah, dimana curah hujan sedang dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 28 ~ 35 °C

d. Kependudukan:

**Tabel 4.2., Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
kelurahan Guntung**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3012
2.	Perempuan	2591
3.	Total	5603
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1400

Sumber: Kantor kelurahan Guntung, tahun 2004

Dari tabel 4.2. di atas tampak bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan karena banyak pendatang laki-laki bujang yang tinggal sementara di wilayah Guntung untuk mencari pekerjaan atau bekerja di lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

**Tabel 4.3., Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
kelurahan Guntung**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	720
2.	Tidak tamat SD	379
3.	SD	1547
4.	SMP / SLTP	875
5.	SMU / SLTA	1357

Sumber: Kantor kelurahan Guntung, tahun 2004

Dari tabel 4.3. di atas tampak bahwa penduduk yang belum bersekolah termasuk anak-anak yang belum masuk usia sekolah berjumlah 720 orang, dan penduduk yang tidak tamat SD berjumlah 379 orang. Sebagian besar dari anak-anak yang tidak tamat SD ikut membantu orang tuanya di laut mencari ikan atau membantu di ladang. Orang tuanya belum begitu memperhatikan pentingnya sekolah bagi anak-anaknya. Dari tabel 4.3. juga tampak bahwa penduduk yang tamat SD berjumlah 1547 orang. Hal ini disebabkan banyak tenaga bongkar muatan kapal di pelabuhan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Guntung. Mayoritas tingkat pendidikan tenaga bongkar muatan kapal hanya sampai tingkat SD saja. Mereka hanya mengandalkan tenaga kasar saja untuk melakukan bongkar muat di kapal yang berlabuh di pelabuhan khusus PT. Pupuk Kalimantan Timur.

**Tabel 4.4., Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
kelurahan Guntung**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	33
2.	ABRI	1
3.	Karyawan swasta	546
4.	Wiraswasta	243
5.	Tani	318
6.	Buruh Tani	23
7.	Nelayan	53

Sumber: Kantor kelurahan Guntung, tahun 2004

Dari tabel 4.4. tampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 546 orang dan wiraswasta sebanyak 243 orang. Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengatakan pekerjaannya adalah swasta, mereka ini sebagian adalah tenaga bongkar muat, sopir ojek dan sopir taxi. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani masih cukup banyak, yaitu 318 orang dan penduduk yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 53 orang.

Pada tahun 1989, PT. Pupuk Kalimantan Timur telah merelokasi sungai Guntung, yang sebelumnya bermuara di laut yang berdekatan dengan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Alasan relokasi sungai Guntung adalah untuk mencegah endapan lumpur yang terbawa oleh sungai Guntung agar tidak masuk dan mengganggu proses pemompaan air laut untuk mensuplai kebutuhan air pendingin pabrik. Salah satu jalan darat untuk memasuki wilayah Guntung adalah melalui wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur. Jalan darat ini berupa jalan beton yang dibuat oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur. Saat ini telah dibuat jalan tembus melalui wilayah Sidrap menuju bukit Kusnodo. Jalan tembus ini sepanjang 5 km dengan lebar sekitar 10 m dan melalui 9 jembatan, belum dilakukan pengerasan. Masyarakat Guntung berharap agar program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Bontang untuk bersama-sama membangun jalan tersebut agar petani dan nelayan di Guntung dapat menjual hasil kebun dan ikan tangkapan. Disamping jalan darat, jalan untuk mencapai kelurahan Guntung dapat melalui laut.

4.1.2. Sejarah Guntung

Menurut sejarah, pada awal mula penduduk kota Bontang berada di daerah Guntung yang mayoritas didiami oleh masyarakat keturunan Kutai dan Bontang Kuala yang mayoritas didiami masyarakat keturunan Bajau, Sulawesi Selatan. Masyarakat keturunan Kutai yang tinggal di Guntung, menurut sejarah telah menetap di daerah Guntung sejak tahun 1920-an. Masyarakat Kutai di Guntung adalah keturunan dari pecahan keluarga Kerajaan Kutai yang berada di Kesultanan Tenggara, Kalimantan Timur. Akibat adanya perselisihan di antara keluarga Kerajaan Kutai, mereka terpecah dan salah satu dari mereka menetap di wilayah Guntung. Saat ini diperkirakan penduduk Guntung yang merupakan masyarakat keturunan Kutai sekitar 600 Kepala Keluarga.

Pada tanggal 19 Juni 2004, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke XX telah melantik pengurus Dewan Adat dan Lembaga Adat Kutai Guntung Citra Kota Bontang. Tujuan dibentuknya Lembaga Adat Kutai Guntung adalah untuk melestarikan Adat dan Budaya Kutai di Bontang.

4.1.3. Fasilitas yang tersedia di Guntung

Fasilitas yang tersedia di wilayah Guntung adalah:

- TK swasta "Darul Ulum" terdiri dua ruangan
- SD swasta "Darul Ulum" terdiri dua ruangan dan baru sampai kelas 4
- SD Negeri 007
- Posyandu "Sehat Etam"
- Pelabuhan nelayan ikan
- Masjid

4.1.4. Potensi Wilayah Guntung

Wilayah Guntung mempunyai potensi alam dan sosial yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

A. Potensi Alam dan Budaya

- Pertanian, terdiri dari tanaman padi, jagung dan kacang tanah
- Perkebunan, yang terdiri dari pisang dan salak
- Kelautan, terdiri dari ikan dan udang

- Tambak ikan
- Obyek wisata, yaitu pulau Gusung, Pesta adat “Erau”.

B. Potensi Sosial

- Lembaga adat Kutai yang memelihara budaya masyarakat Kutai.
- Kelompok Pemuda Guntung, terdiri dari Karang Taruna dan Lembaga Swadaya masyarakat “Guntung”.

4.2. Sejarah Singkat Kota Bontang

Pemerintahan kota Bontang dibentuk melalui **Undang-undang No.47 Tahun 1999** yang berupa pemekaran Kabupaten Kutai menjadi empat daerah tingkat II, yaitu daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Pemerintah kota Bontang. Peningkatan status dari yang sebelumnya berupa kota administratif menjadi Pemerintahan Kota yang otonom. Sejak saat itu Kota Bontang telah resmi menjadi daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai daerah otonom kota Bontang berdiri sejajar dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kota lainnya di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan baik kewenangan wajib sebagaimana telah diatur dalam **Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 11** tentang Pemerintahan Daerah maupun kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh **Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Tumbuh dan berkembangnya Bontang menjadi sebuah kota sangat erat kaitannya dengan keberadaan dua industri besar yakni PT Badak NGL yang berdiri pada tahun 1974 dan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 1977 sebagai penggerak utama tumbuhnya Bontang seperti sekarang ini. PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi urea yang mencapai 3 juta ton per tahun merupakan pabrik pupuk urea terbesar di dunia yang berada dalam satu lokasi, sedangkan PT Badak NGL adalah industri penghasil gas alam cair, saat ini mempunyai kapasitas

produksi per tahun sebesar 22,5 juta ton Liquid Natural Gas, yang menjadikan PT. Badak NGL sebagai perusahaan penghasil gas alam cair terbesar di dunia.

Menurut buku Rencana Induk Kota (RIK) Bontang 1984/1985 ~ 2004/2005, menjelang berdirinya kedua industri tersebut yaitu PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur terjadi migrasi besar-besaran. Pada tahun 1974, penduduk Bontang hanya 13.555 jiwa, tetapi pada tahun 1983 telah berubah menjadi 53.478 jiwa, sehingga ada kenaikan sebesar 420 %. Para pendatang tersebut berasal dari Sulawesi, Jawa, Sumatra, Kalimantan Selatan, Bali, Lombok, dan Kalimantan Timur sendiri. Pada waktu yang sama rata-rata kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai hanya 79 %.

4.3. Sejarah Singkat PT. Pupuk Kalimantan Timur

PT. Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berlokasi di Bontang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977, adalah industri penghasil pupuk urea. PT. Pupuk Kalimantan Timur terletak di Bontang yang berjarak sekitar 120 KM dari Samarinda, ibukota propinsi Kalimantan Timur.

Tujuan utama pembangunan pabrik pupuk urea PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengembangan industri dan ekonomi nasional, khususnya sektor industri pupuk dan industri kimia. PT. Pupuk Kalimantan Timur saat ini memiliki 4 (empat) pabrik ammonia dan 5 (lima) pabrik urea termasuk unit utilitas. Kapasitas total produksi per tahun 1.749.000 ton Ammonia dan 2.980.000 ton Urea. Kapasitas produksi urea ini terdiri dari 1.840.000 ton Urea Prill dan 1.140.000 ton Urea Granul. Hasil produksi utama berupa pupuk urea adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di dalam negeri sedangkan sisanya diekspor ke negara-negara seperti Vietnam, Philipina, Thailand, Bangladesh dan Cina.

Sekitar tahun 1970-an, ditemukan sumber gas alam di Attaka, Muara Badak, Handil, Nilam, dan Bekapai oleh kontraktor-kontraktor Total Indonesia, Union Oil dan Huffco. Mereka adalah kontraktor-kontraktor pertama yang berhasil mengeksploitir kandungan gas alam dari bumi Kalimantan Timur. Pada tahun 1973 Pertamina mulai

membangun industri pengolahan gas alam menjadi gas alam cair yang dikenal dengan nama LNG Badak, yang terletak di daerah Bontang Selatan. Mengingat kekayaan gas alam yang sangat besar, Pertamina juga merencanakan membangun pabrik pupuk terapung di atas dua kapal. Proyek pabrik pupuk terapung mulai dikerjakan pada tahun 1974. Proyek pabrik pupuk terapung ini dibangun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam tahun 1973 terjadi kelangkaan pupuk di pasaran international sehingga harga pupuk melonjak sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea dalam negeri agar tidak tergantung dengan pupuk import, perlu dibangun pabrik pupuk yang dapat segera menghasilkan.
- Ditemukan gas dalam jumlah besar di Attaka, tetapi setelah diteliti cadangannya hanya cukup untuk 10 sampai 12 tahun . Dengan mendirikan pabrik di atas kapal terapung, maka jika terjadi kekurangan gas di Attaka, pabrik dapat dipindah ke tempat lain.
- Rencana proyek pabrik pupuk terapung ini diusulkan oleh Konsorsium International Process Industries (IPI) dan Copper Rust, didukung oleh Stamicarbon, Lurgi dan Grande Parroise sebagai proses desainer yang cukup berpengalaman dalam industri ammonia dan urea.
- Pekerjaan inspeksi mulai dari tahap desain, marine dan mekanik dipergunakan jasa Lloyd's Register of Shipping dan Lloyd's Industrial register sebagai pihak yang bebas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pertamina memutuskan untuk melaksanakan konsep pabrik terapung, walaupun diketahui adanya kelemahan-kelemahan seperti performance pabrik terhadap gerakan kapal akibat terjadinya ombak, aspek keamanan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan pabrik. Setelah melalui peninjauan ke lokasi proyek dan serangkaian perjalanan ke Eropa melihat berbagai peralatan dan kapal yang akan dibawa ke Indonesia, serta melalui diskusi dan studi yang mendalam, maka rencana pabrik terapung dipindah ke darat. Pertimbangan pabrik terapung dipindah ke darat terutama karena adanya pengaruh gerakan kapal karena ombak terhadap performance pabrik, ditemukan lapangan-lapangan gas yang dapat menjamin penyediaan gas selama 25 tahun, di samping

keadaan secara teknis dan kondisi tanah di daratan Bontang utara memungkinkan untuk menjadi lokasi pabrik pupuk.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menata kembali bidang tugas Pertamina, maka pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pembinaan proyek dari Pertamina kepada Departemen Perindustrian. Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam SK Presiden RI No. 39 Tahun 1976.

Tabel 4.5., Data pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur

PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR BONTANG - INDONESIA							
No.	Data Teknis	Kaltim-1	Kaltim-2	Kaltim-3	POPKA	Kaltim-4	Total
1.	Produksi:						
	- Ammonia (MTPD) (MTPY)	1,800 595,000	1,800 595,000	1,000 330,000		1,000 330,000	5,600 1,850,000
	- Urea (MTPD) (MTPY)	2,125 700,000	1,725 570,000	1,725 570,000	1,725 570,000	1,725 570,000	9,025 2,980,000
2.	Teknologi:						
	- Ammonia - Urea	Lurgi Stamicarbon	M.W. Kellog Stamicarbon	Haldor Topsoe Stamicarbon	Snamprogetti	Haldor Topsoe Snamprogetti	
3.	Power Generation						
	- Gas Turbine (MW) - 11 KV - Steam Turbine (MW) - 6.6 KV	- 27.2	30 -	30 -			60 27.2
4.	Steam Generation						
	- Steam 80 kg/cm ² (TPH) - Steam 40 kg/cm ² (TPH)	130 160	240	140			510 160
5.	Desalination						
	- Water (TPH)	270	210	140	70	140	830
6.	Storage						
	- Ammonia (TON) - Urea Bulk (TON)	26,000 40,000	26,000 30,000		45,000	40,000	52,000 155,000
7.	Natural Gas						
	MMSCFD (rate 100%)	80	75	43		37	
8.	Air Separation Unit						
	Nitrogen NM ³ /Hr Oxygen NM ³ /Hr	200 500		300 500			500 1,000

Sumber: Biro Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur

Pabrik yang telah dipindah ke darat selanjutnya disebut pabrik Kaltim-1 dengan kapasitas pabrik ammonia 1500 ton per hari dan pabrik Urea prill 1700 ton per hari. Kemudian pada tahun 1982 dimulai pembangunan pabrik Kaltim-2 dengan kapasitas pabrik Ammonia 1500 ton per hari dan pabrik Urea prill 1725 ton per hari. Pada tahun 1986 Pemerintah memutuskan untuk membangun pabrik Kaltim-3 dengan kapasitas pabrik Ammonia 1000 ton per hari dan pabrik Urea 1725 ton per hari. Pada tahun 1996 dibangun pabrik urea granular yang disebut pabrik POPKA dengan kapasitas

urea granular 1725 ton per hari. Pada tahun 1998 mulai dibangun pabrik Kaltim-4 dengan kapasitas pabrik Ammonia 1000 Ton per hari dan pabrik Urea granular 1725 ton per hari

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur dan pembahasan manfaat dan dampak.

5.1. Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Di Guntung

PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai perusahaan yang profesional akan terus berusaha mengembangkan usahanya yang berbasis pada industri kimia dengan memiliki visi menjadikan perusahaan kelas dunia di bidang industri pupuk dan kimia.

Untuk mewujudkan rencana tersebut PT. Pupuk Kalimantan Timur mengemban misi:

1. Menyediakan kebutuhan pupuk, khususnya untuk dalam negeri dalam rangka menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional.
2. Mendapatkan keuntungan dalam manfaat baik pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya.
3. Peduli pada masyarakat lingkungan (*community development*)

PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan kepedulian kepada masyarakat Bontang, khususnya masyarakat di sekitar pabrik harus memperhatikan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003.

Pada Bab-1 Kep-236/MBU/2003 tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa:

1. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Unit Program Bina Lingkungan adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dari Kep. Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003, disebutkan:

Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk:

- a. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, terdiri dari:
 - Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.
 - Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis.
 - Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara.
 - Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.

- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari:
 - Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.
 - Bantuan biaya pendidikan/beasiswa.
 - Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah.
 - Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

- c. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terdiri dari:
 - Renovasi balai pengobatan masyarakat.
 - Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.

- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:
 - Rehabilitasi prasarana pendidikan.
 - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.
 - Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.

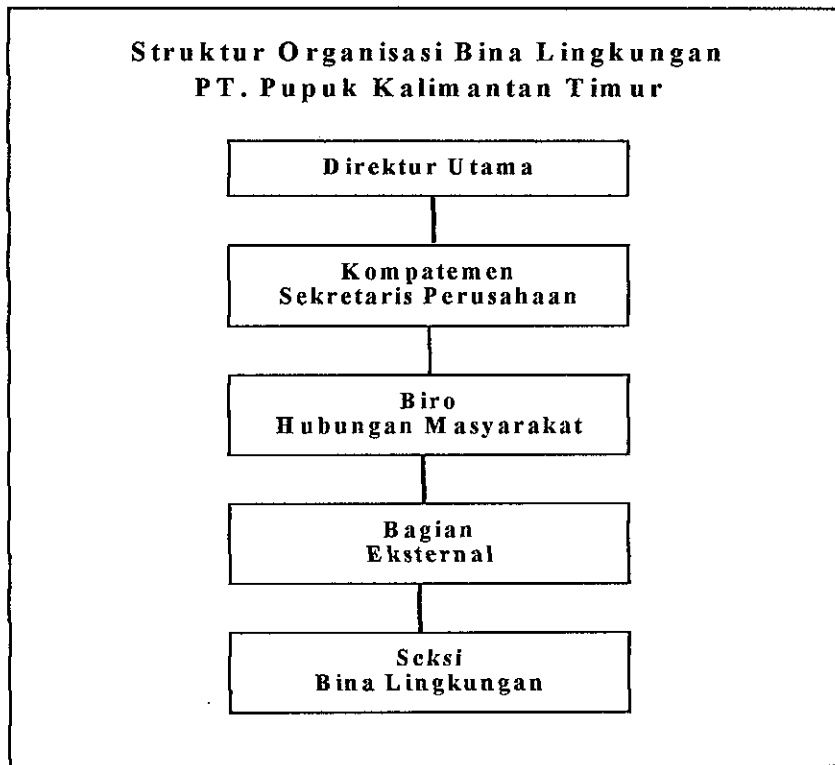
- e. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, terdiri dari:
- Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah.
 - Pengadaan perlengkapan ibadah.
 - Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Program Bina Lingkungan di PT. Pupuk Kalimantan Timur dilakukan dibawah koordinasi Biro Humas. Pelaksanaan program Bina Lingkungan untuk membantu pengembangan masyarakat kota Bontang dan memberi manfaat kepada masyarakat. Tujuan program Bina Lingkungan adalah untuk meningkatkan kepedulian PT. Pupuk Kalimantan Timur terhadap pembinaan lingkungan terutama di sekitar lokasi pabrik.. Program Bina Lingkungan ini seluruhnya berbentuk hibah, dimana wujud nyatanya adalah bantuan biaya. Dana untuk keperluan program Bina Lingkungan menurut Kep-236/MBU/2003, nilainya maksimal sebesar satu persen dari laba setelah pajak

Program CD yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur yaitu suplai air bersih, bantuan perbaikan masjid dan bantuan kios, kemudian bantuan yang dilaksanakan oleh Yayasan masjid Baiturrahman adalah bantuan baitul maal kepada masyarakat guntung dan bantuan pembinaan anak asuh masyarakat Guntung.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Guntung selama tiga bulan dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2004. Jumlah responden sebanyak 14 orang terdiri dari empat orang penduduk asli Guntung, dua orang tokoh masyarakat, dua orang pejabat Kelurahan, dua orang Ketua RT, empat orang penduduk pendatang. Selama penelitian dilakukan observasi ke lokasi tanki air, masjid dan kios.

Struktur organisasi Bina Lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut:



Sumber: Biro Personalia PT. Pupuk Kalimantan Timur, tahun 2004

5.1.1. Suplai Air Minum

Sebelum ada kegiatan pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur, masyarakat Guntung menggunakan air sungai Guntung untuk kebutuhan mandi dan cuci, sedangkan kebutuhan air untuk minum diperoleh dari sumur dangkal. Masalah muncul sejak ada kegiatan proyek pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Pembangunan perumahan "Housing" digunakan untuk tempat tinggal Manajemen, sebagian karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur dan expert. Lokasi perumahan "Housing" berdekatan dengan wilayah Guntung. Limbah domestik (septic tank) dari perumahan Housing dibuang ke sungai Guntung, sehingga air sungai Guntung tercemar oleh limbah domestik. Akibatnya masyarakat Guntung tidak bersedia menggunakan air sungai Guntung sebagai air mandi dan cuci.

Masyarakat Guntung mengeluhkan hal ini kepada tokoh-tokoh masyarakat Guntung. Tokoh masyarakat bertindak sebagai pendamping untuk bersama masyarakat Guntung melakukan identifikasi permasalahan. Pada pertemuan antara masyarakat Guntung dengan tokoh masyarakat, melalui diskusi dan curah pendapat, diperoleh identifikasi permasalahan, yaitu masyarakat Guntung:

- tidak dapat menggunakan sungai Guntung untuk mandi.
- perlu dicari alternatif sebagai pengganti air sungai Guntung

Dari hasil pertemuan tersebut alternatif yang dipilih adalah meminta suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur. Selanjutnya beberapa tokoh masyarakat datang menemui Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur membicarakan masalah tersebut.

Gambar 1, Sungai Guntung



Kondisi sungai Guntung bulan Agustus 2004. Air sungai tampak kotor dan tidak layak digunakan untuk mandi dan mencuci.

Gambar 2, Sungai Guntung



Rumah penduduk Guntung sepanjang sungai Guntung. Limbah domestik dari rumah penduduk dibuang ke sungai Guntung.

Pada tahun 1982, Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur memutuskan kebijakan untuk memberi bantuan air ke wilayah Guntung, dimana kualitasnya adalah air yang diambil dari sumur dalam tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pada saat itu belum ada ketentuan dari pemerintah untuk program pemberdayaan masyarakat. Dimulainya ketentuan pemerintah baru sekitar tahun 1994.

Tujuan pemberian bantuan air ini sebagai pengganti kebutuhan air warga Guntung, akibat tercemarnya sungai Guntung oleh limbah domestik perumahan Housing.

PT. Pupuk Kalimantan Timur mempunyai beberapa sumur bor. Lokasi salah satu sumur bor berada dekat dengan wilayah Guntung. Air dari sumur bor dipompakan ke Unit pengolahan air yang terletak di Housing dan sebagian dikirim melalui pipa ke wilayah Guntung dan selanjutnya dimasukkan kedalam tanki air berukuran 3000 liter. Masyarakat Guntung mengambil air dari tanki tersebut dengan menggunakan jerigen. Air dari tanki digunakan untuk mandi dan cuci.

Sejak tahun 2000, PT. Pupuk Kalimantan Timur memberikan bantuan air yang berasal dari Unit pengolahan air di Housing. Kualitas air dari unit pengolahan air Housing adalah air yang telah diolah. Kualitas air yang telah diolah lebih baik dari kualitas air yang dikirim sebelumnya.

Proses pengolahan raw water menjadi potable water di unit pengolahan air Housing:

Air dipompakan dari sumur bor dan dimasukkan ke tanki *raw water*. Dari tanki *raw water*, air dipompakan ke *unit Aerator* untuk memisahkan kandungan besinya. Air di wilayah Bontang banyak mengandung unsur Besi dan bersifat asam. Air yang telah dipisahkan kandungan besinya di *unit aerator* kemudian diberi larutan kimia berupa:

- tawas yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang masih melayang di dalam air.

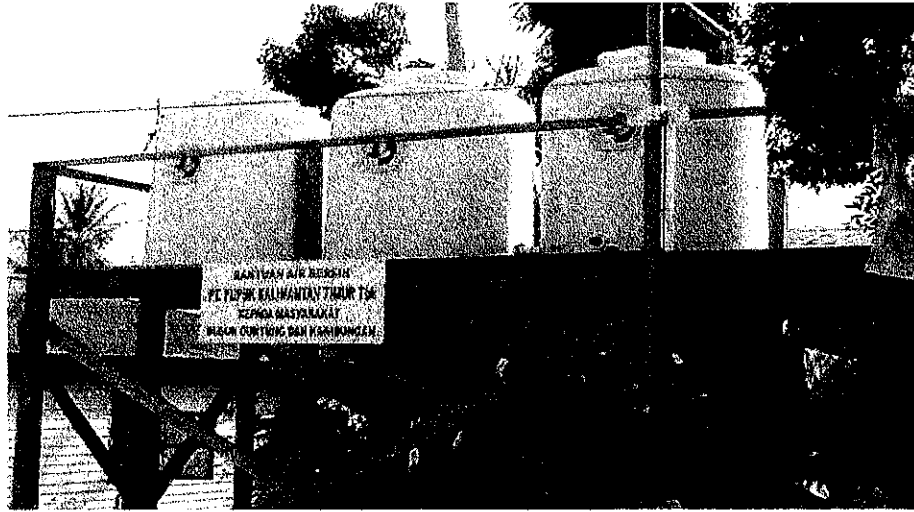
- kapur yang berfungsi untuk menaikkan pH.
- kaporit yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri.

Setelah diberi larutan kimia dilewatkan *Sedimentasi* untuk proses pengendapan, dan kemudian dimasukkan *unit Filter* yang terdiri dari pasir dan antrasit untuk menyaring kotoran/endapan dan menghilangkan bau. Selanjutnya air bersih (*potable water*) dimasukkan kedalam *tanki potable water* dan didistribusikan ke perumahan Housing, camp karyawan, pabrik dan Guntung.

Air bersih (*potable water*) dialirkan melalui pipa diameter 2" ke tiga titik di wilayah Guntung, dimana masing-masing titik terdapat 3 (tiga) buah tanki air yang terbuat dari fiber glass dengan kapasitas 1100 liter. Masyarakat Guntung mengambil air ke tanki air dengan menggunakan jerigen.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Gambar 3, tanki air bersih di Guntung



Tanki air bersih masing-masing dengan kapasitas 1100 liter. Masyarakat Guntung mengambil air dengan menggunakan jerigen.

Gambar 4, tanki air bersih di Guntung



Lokasi tanki air bersih di depan SD Negeri 007 Guntung. Kapasitas tanki air bersih masing-masing 1100 liter. Tampak jerigen air yang digunakan masyarakat Guntung untuk mengambil air. Di sekitar tanki air, kondisi lingkungan tertata dengan baik.

Pengiriman air ke wilayah Guntung diatur dari jam 06.00 ~ 18.00, dan dicatat secara berkala oleh Bagian Water Treatment PT. Pupuk Kalimantan Timur. Pembagian air (*raw water dan potable water*) diatur oleh masing-masing RT (Rukun Tetangga). Kapasitas aliran air yang dikirim ke Guntung adalah:

- air bersih (*potable water*) sebesar 120 M3 per hari
- air sumur (*raw water*) sebesar 120 M3 per hari.

Catatan: - harga air bersih Rp. 2.250,-
- harga air sumur Rp.1.250,-

Dengan adanya bantuan suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, masyarakat Guntung merasa diperhatikan akan kebutuhan air untuk mandi dan cuci. Dan semenjak tahun 2000, suplai air telah ditambah dengan air yang sudah diolah.

“Program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung terutama bantuan air yang telah berjalan selama ini hendaknya dipertahankan, karena air merupakan kebutuhan utama untuk hidup” (Win, 41 tahun)

5.1.2. Bantuan untuk Masjid

Sebagian besar atau sekitar 90% masyarakat Guntung memeluk agama Islam. Masjid digunakan sebagai tempat ibadah shalat dan pengajian serta pendidikan anak-anak membaca Al-Quran (TKA). Pada hari Jum'at, masjid digunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Masalah muncul karena kondisi masjid yang dibangun sekitar tahun 1985 memprihatinkan karena atap yang terbuat dari seng banyak yang bocor, sehingga jika turun hujan mengganggu orang yang sedang beribadah. Dinding Masjid yang terbuat dari kayu banyak yang sudah lapuk. Para jemaah Masjid sering mengeluhkan hal ini kepada pengurus Masjid dan meminta pengurus

mencarikan dana untuk memperbaiki masjid. Atas dasar desakan jemaah masjid, pengurus masjid dan salah seorang tokoh masyarakat Guntung membuat proposal untuk memperbaiki masjid. Proposal diajukan kepada Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur.

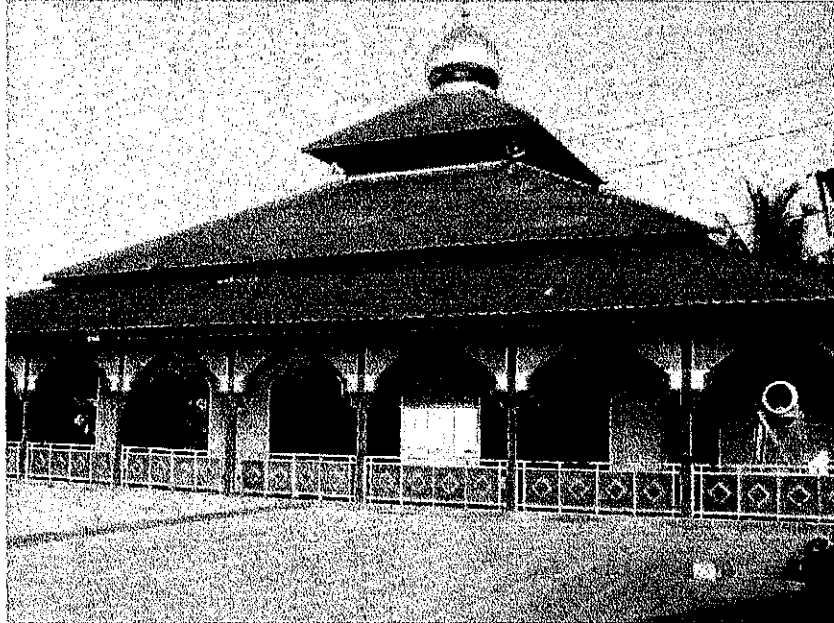
Dengan tujuan untuk membantu masyarakat Guntung didalam melaksanakan ibadah di masjid, pada tahun 2000, Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur memberikan bantuan untuk masjid. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Bantuan berupa material, terakhir diterima oleh pengurus masjid bernilai Rp. 50 juta, yang dipergunakan untuk pembangunan atap dan dinding masjid sedangkan lantai masjid dibantu oleh Pemerintah Kota Bontang.

“Kami warga Guntung sangat senang menerima bantuan renovasi masjid dari PT. Pupuk Kalimantan Timur. Sebenarnya kami sudah lama menunggu bantuan ini, tapi baru sekarang bantuan kami terima. Menurut kami sejak Bapak Omay K Wiraatmadja menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, perhatian beliau sangat besar kepada warga Guntung” (Djuarip, 38 tahun)

Drs. Omay K. Wiraatmadja, AK menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur sejak tahun 2001, dan sejak menjabat ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

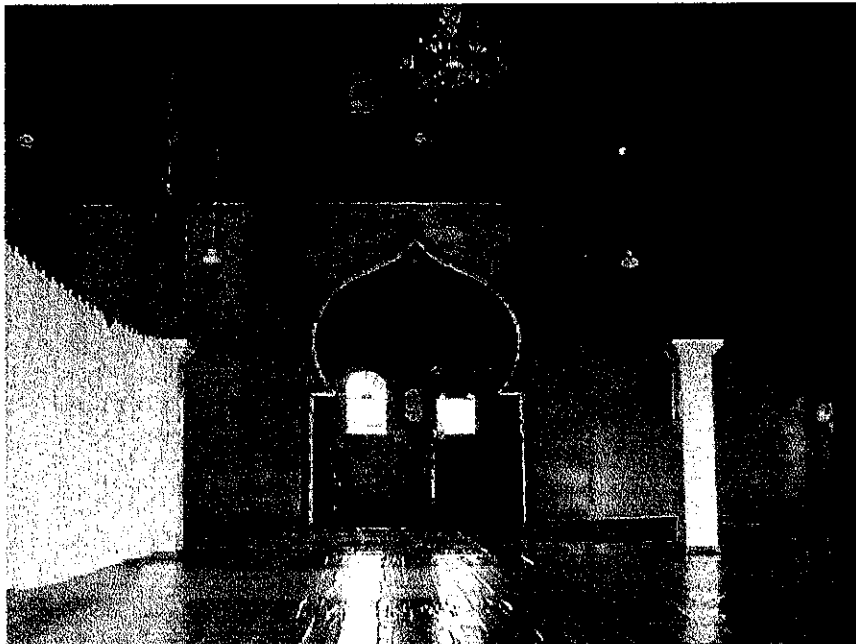
“Bapak Omay mau berkunjung ke Guntung. Beliau mau berdialog dan terbuka dengan warga Guntung. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Baru semenjak beliau menjabat orang nomor satu di PT. Pupuk Kalimantan Timur ada keterbukaan dengan warga Guntung” (Abd, 32 tahun).

Gambar 5, Masjid Di Guntung



Atap masjid yang sudah direnovasi atas bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Kondisi lingkungan di sekitar masjid menjadi lebih bersih.

Gambar 6, Bagian Dalam Masjid Guntung



Bagian dalam masjid Guntung yang sudah direnovasi, dilengkapi dengan lampu dan kipas angin.

5.1.3. Bantuan kios

Pada mulanya banyak pedagang kaki lima yang berdagang di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berbatasan dengan pagar wilayah Guntung. Pedagang kaki lima adalah warga Guntung. Karena letak kios pedagang tidak beraturan dan berada di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur, pihak perusahaan merencanakan untuk membongkar kios tersebut. Para pedagang mengadakan rencana perusahaan tersebut. Setelah diadakan rapat antara para tokoh masyarakat Guntung, kemudian diputuskan untuk membicarakan dengan pihak Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur bagaimana agar para pedagang yang merupakan warga Guntung tidak kehilangan mata pencahariannya.

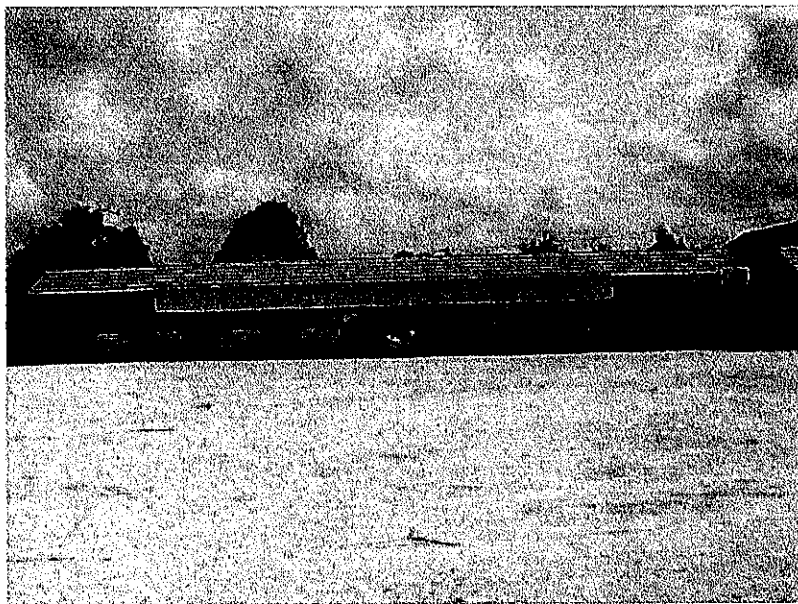
Pada tahun 2002, PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan hasil mufakat dengan tokoh masyarakat Guntung, memberikan bantuan kios Pujasera sebanyak 15 kios. Letak kios Pujasera tersebut berada di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur berbatasan dengan pagar wilayah Guntung. Pembagian kios tersebut dilakukan oleh Forum pemuda Guntung, dan yang mendapat bagian harus warga Guntung.

Gambar 7, kios pujasera di Guntung



Dari gambar diatas tampak lokasi kios bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur berbatasan dengan pagar wilayah Guntung. Lokasi kios berada di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Gambar 8, Kios Bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur



Kios tampak lebih tertib dan bersih, sehingga banyak pembeli yang datang untuk makan. Kondisi lingkungan sekitar kios menjadi lebih nyaman, sampah dibuang pada tempatnya..

5.1.4. Program pengembangan masyarakat Yayasan Masjid Baiturrahman PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung

Yayasan Masjid Baiturrahman merupakan lembaga di bawah naungan PT. Pupuk Kalimantan Timur, dimana aktifitasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan membantu mengentaskan kaum dhuafa di kota Bontang dan sekitarnya.

5.1.4.1. Bantuan baitul maal kepada masyarakat Guntung

Baitul maal yayasan Masjid Baiturrahman didirikan pada tanggal 1 Maret 1993. Baitul maal adalah pengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Sodaqoh) di lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur membayar zakat-nya dengan pemotongan gaji setiap bulan. Potensi zakat karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur cukup besar, karena dana ZIS yang terkumpul jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun, yang mana hingga akhir bulan Pebruari 2003 telah terkumpul zakat sebesar 1,383 milyar. Jumlah individu karyawan yang membayar zakat melalui pemotongan gaji masih di bawah 50%, sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi.

Baitul maal memberikan bantuan kepada masyarakat Guntung berdasarkan:

- hasil survey yang di lakukan oleh tim survey baitul maal.
- permohonan dari masyarakat yang tidak mampu dan di ketahui oleh Rukun Tetangga dan atau Lurah.
- Informasi dari orang-orang yang peduli dengan kemiskinan

Orang yang dapat atau berhak menerima bantuan zakat adalah yang memenuhi kriteria (Al-Hadits) sebagai berikut:

1. Fakir: orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan, tidak ada yang memberi nafkah secara rutin. Hidupnya tergantung dari pemberian orang lain.

2. Miskin: orang yang mempunyai sumber penghasilan, akan tetapi tidak dapat membiayai separuh atau sebagian dari kebutuhan hidupnya.
3. Amilin: orang yang bekerja mengurus zakat.
4. Mualaf: orang yang masih perlu dipikat hatinya, seperti mereka yang baru masuk Islam atau orang yang berpengaruh yang dapat mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam.
5. Gharimin: orang yang terikat hidupnya dengan hutang.
6. Riqob, orang yang teraniaya / tertindas pihak lain (budak dan lain-lain).
7. Fisabilillah: orang yang membela tegaknya agama Islam yang tidak digaji, atau pembiayaan untuk penyebaran syiar Islam, seperti dakwah, pendidikan agama, pembangunan tempat ibadah.
8. Ibnu Sabil: orang yang terputus atau kehabisan biaya di perjalanan seperti pelajar, orang yang bepergian.

Pada bulan September 2000 terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah penduduk di wilayah Guntung. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Guntung dan diketahui oleh Rukun Tetangga dan Lurah Guntung, tim survey baitul maal melakukan survey ke lokasi kebakaran. Tim survey melakukan pendataan kondisi ekonomi serta melakukan wawancara dengan orang yang terkena musibah kebakaran tersebut. Pada waktu wawancara, tim survey menanyakan kepada orang yang terkena musibah, apa masalah yang paling mendesak saat ini dan apa rencana selanjutnya.

Selanjutnya laporan hasil survey dibicarakan pada rapat pengurus baitul maal. Jika hasil rapat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria layak untuk dibantu, maka baitu maal mengeluarkan dana untuk diberikan kepada orang yang terkena musibah kebakaran. Bantuan berupa uang kontan yang dapat digunakan oleh si penerima untuk memperbaiki rumah atau membuka usaha.

Berdasarkan pengalaman, beberapa orang yang telah menerima bantuan dari baitul maal ada yang berusaha mengembalikan bantuan dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai kemampuannya, walaupun kepadanya dikatakan bahwa bantuan zakat tidak untuk dikembalikan.

“Ada seorang yang kami beri bantuan zakat sebesar Rp.8.000.000,- untuk membuka usaha. Bantuan zakat ini bersifat hibah, jadi tidak untuk dikembalikan. Tapi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan uang zakat tersebut sambil menangis. Dia malu untuk menerima dengan cuma-cuma. Bulan berikutnya dia datang dengan membawa uang Rp.200.000,- untuk membayar kepada baitul maal, dengan mengatakan bahwa itulah kemampuan dia saat ini, dan mohon do’a agar bulan depan dapat membayar lebih besar lagi. Kami akhirnya menerima karena yang bersangkutan mendesak terus untuk mengembalikan uang yang dia terima” (Bapak Mar, 51 tahun)

5.1.4.2. Bantuan program Pembinaan Anak Asuh masyarakat Guntung

Program pembinaan anak asuh dimulai tahun 1992. Sumber dana diperoleh dari zakat dan sodaqoh sebagian besar karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui pemotongan gaji setiap bulan. Program ini memberikan bantuan bea siswa kepada anak-anak di Bontang dan sekitarnya, dengan jumlah anak asuh per tahun sekitar 300 anak.

Program pembinaan anak asuh dilakukan berdasarkan informasi dari orang-orang yang peduli terhadap nasib orang tidak mampu dan surat permohonan dari orang yang tidak mampu.

Prosedurnya sebagai berikut:

Program pembinaan anak asuh menerima informasi dari orang-orang yang peduli terhadap nasib orang tidak mampu atau menerima surat permohonan dari orang tidak mampu, kemudian di lakukan survey oleh tim survey program pembinaan anak asuh. Tim survey

melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan statusnya, apakah anak yatim piatu/anak terlantar.

Hal yang disurvei adalah sebagai berikut:

- identitas kepala keluarga
- jumlah anak dan tanggungan
- status tempat tinggal, apakah milik sendiri, sewa atau menumpang
- peralatan penunjang kerja, apakah milik sendiri, kredit atau sewa.
- apakah pernah mendapat bantuan selain dari yayasan masjid Baitur-rahman.
- bantuan yang paling dibutuhkan, seperti modal kerja, konsumtif dalam bentuk dan biaya pendidikan.
- apa saja yang dimiliki oleh pemohon seperti apakah memiliki televisi, kulkas, radio, perabot rumah tangga, sepeda, sepeda motor dan lain-lain.

Setelah hasil survey dikumpulkan, kemudian diadakan rapat pengurus Pembinaan anak asuh.

Hasil rapat pengurus berupa rekomendasi:

- mendesak untuk di bantu
- perlu dibantu
- tidak perlu dibantu

Pada prinsipnya seorang anak layak dibantu atau tidak adalah kondisi orang tua anak yang bersangkutan, dinilai secara ekonomi tidak mampu. Jika diputuskan seorang anak mendesak untuk dibantu biaya pendidikan sekolahnya, maka pengurus mendatangi sekolah yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan akhir dan memberikan biaya pendidikan berupa SPP sebagai berikut:

- sekolah dasar Rp.10.000,-.
- Sekolah menengah pertama berkisar Rp.35.000 ~ Rp.100.000,-.
- Sekolah menengah umum berkisar Rp.35.000 ~ Rp.120.000,-..

Selain SPP, juga diberikan bantuan buku-buku pelajaran dan sumbangan gedung. Bantuan buku dan sumbangan gedung tidak di berikan sepenuhnya tapi setelah dilakukan pembicaraan dengan orang tua anak mengenai kesanggupannya untuk membayar. Pada umumnya biaya buku dan sumbangan gedung ditanggung bersama antara pihak orang tua anak dan Pembinaan anak asuh. Tujuannya agar orang tua anak merasa turut bertanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya. Walaupun demikian ada juga orang tua murid yang mengaku tidak mampu, walaupun dari penampilan tidak menunjukkan orang dari kelompok tidak mampu.

“Pernah datang ke kami seorang ibu yang memohon bantuan bea siswa bagi anaknya. Dari dandanannya ibu tersebut mengenakan gelang yang terbuat dari emas. Kami jadi curiga, tapi kami tetap berusaha bersikap ramah dan menanyakan raport anaknya. Setelah kami cek ternyata nilai rapornya biasa-biasa saja, tidak ada nilai yang menonjol. Lalu ibu itu kami nasihati bahwa bantuan bea siswa ini diperuntukkan bagi anak-anak dari orang tua yang tidak mampu” (Bapak Tum, 38 tahun).

Anak-anak yang menerima program pembinaan anak asuh di Guntung adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| - sekolah dasar | = | 3 anak |
| - sekolah menengah pertama | = | 8 anak |
| - sekolah menengah umum | = | 6 anak |

5.2. Pembahasan:

Pembahasan ini merujuk pada judul tesis, yaitu "Program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung", untuk menjawab pertanyaan bagaimana

proses, manfaat, dampak pemberdayaan masyarakat dan bagaimana model pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung.

5.2.1. Analisis Proses CD

Program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk masyarakat Guntung adalah suplai air minum, bantuan masjid dan bantuan kios, sedangkan program Baitul maal dari yayasan masjid Baiturrahman berupa zakat. Analisis CD dilakukan dengan menggunakan tujuh langkah perencanaan, yaitu: masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan.

Matrik Identifikasi Evaluasi Tipologi CD

(diadopsi dari tabel Edi Santoso)

No.	Perlakuan Jenis Program	Tipologi					Jumlah
		Pembelajaran	Pendampingan	Perlindungan	Mediasi	Pelembagaan	
1.	Suplai air bersih	0	1	3	2	2	8
2.	Perbaikan masjid	0	1	2	2	2	7
3.	Kios	2	1	2	2	2	9
Jumlah:		2	3	7	6	6	

Keterangan:

Skala:	
0	sangat buruk
1	buruk
2	sedang
3	baik
4	sangat baik

Dari tabel matrik identifikasi evaluasi tipologi CD di atas tampak bahwa dari ke tiga program pemberdayaan PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat Guntung menunjukkan bahwa kios mempunyai skala tertinggi, kemudian suplai air bersih diikuti perbaikan masjid.

- **Pembelajaran**, suplai air bersih dan perbaikan masjid tidak ada pembelajaran, sedangkan kios tipologi pembelajaran menunjukkan skala *sedang*. Bantuan kios memberikan pembelajaran kepada pedagang kaki lima bagaimana berjualan yang

bersih dan tertib. Kondisi lingkungan lebih baik dari semula karena para pedagang membuang sampah pada tempatnya.

- **Pendampingan**, belum menunjukkan pendamping yang sesungguhnya. Pendamping belum membantu masyarakat Guntung menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di masyarakat Guntung.
- **Perlindungan hak-hak sipil**, untuk suplai air bersih menunjukkan baik, karena suplai air bersih dari PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat Guntung melindungi masyarakat dari kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan perbaikan masjid dan kios menunjukkan sedang karena perbaikan masjid dan kios bukan kebutuhan dasar.
- **Mediasi**, menunjukkan sedang, karena masalah yang muncul antara pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan masyarakat Guntung relatif dapat diselesaikan dengan baik.
- **Pelembagaan**, menunjukkan sedang.

5.2.1.1. Air Bersih

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Kepada Masyarakat Guntung

1. Suplai Air Bersih

No.	Proses CD	Pelaksanaan Proses CD			Total
		Baik	Sedang	Buruk	
1.	Identifikasi Permasalahan		1		
2.	Tujuan		1		
3.	Analisis Kondisi			0	
4.	Alternatif Kebijakan			0	
5.	Pilihan Kebijakan			0	
6.	Implementasi		1		
7.	Pemantauan	2			
Total :		2	3	0	5

- **Masalah**, dari tabel tampak proses identifikasi menunjukkan sedang. Sebelum ada kegiatan pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur, masyarakat Guntung menggunakan air sungai Guntung untuk kebutuhan

mandi dan cuci, sedangkan kebutuhan air untuk minum diperoleh dari sumur dangkal. Masalah muncul sejak ada kegiatan proyek pembangunan pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Dengan dibangunnya perumahan “Housing” yang digunakan untuk tempat tinggal Manajemen, sebagian karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur dan expert. Lokasi perumahan “Housing” berdekatan dengan wilayah Guntung. Limbah domestik (septic tank) dari perumahan Housing dibuang ke sungai Guntung, sehingga air sungai Guntung tercemar oleh limbah domestik. Akibatnya masyarakat Guntung tidak bersedia menggunakan air sungai Guntung sebagai air mandi dan cuci.

- **Tujuan**, dari tabel tampak proses tujuan menunjukkan sedang.. Perumusan tujuan dilakukan oleh masyarakat Guntung dengan pendamping. Disini bertindak sebagai pendamping adalah tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat Guntung mengadakan permasalahan kepada tokoh masyarakat Guntung, bahwa air sungai Guntung tidak dapat digunakan untuk mandi dan cuci, sehingga perlu dicari pengganti air untuk kebutuhan mandi dan cuci.
- **Analisis kondisi**, dari tabel tampak proses analisis kondisi buruk, karena masyarakat belum melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di masyarakat Guntung.

Tokoh masyarakat dan masyarakat Guntung mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan tercemarnya air sungai Guntung. Pada saat itu sebagian masyarakat Guntung memiliki sumur yang kondisinya cukup baik. Ini merupakan kekuatan/potensi masyarakat Guntung yang perlu dimanfaatkan. Diperlukan teknologi sederhana untuk menyaring air agar kualitas air yang diperoleh sesuai yang diharapkan. Saat itu kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat Guntung kurang mendapat perhatian dari tokoh masyarakat.

- **Alternatif kebijakan**, dari tabel tampak proses alternatif kebijakan menunjukkan buruk, karena tidak dilakukan analisis kondisi, sehingga untuk mengatasi masalah meminta bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Hasil pertemuan antara tokoh masyarakat dan masyarakat Guntung adalah untuk mencari alternatif solusi. Dari hasil pembicaraan tersebut diperoleh alternatif meminta suplai air dari sumur bor PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pertimbangan untuk mengambil dari sumur bor tersebut karena lokasinya dekat dengan wilayah Guntung.

Menurut konsep pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat berdaya, tidak menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberantas kemiskinan, merealisasi keadilan distributif dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata.

Ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat, pada tahap proses alternatif kebijakan, permintaan suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur ke wilayah Guntung tidak menjadikan masyarakat Guntung berdaya, tapi malah menjadikan masyarakat Guntung menjadi tergantung.

Disini peran tokoh masyarakat belum dapat dikatakan sebagai pendamping karena tidak membantu masyarakatnya untuk mencari potensi atau kekuatan yang ada di masyarakat.

- **Pilihan kebijakan**, dari tabel tampak proses pilihan kebijakan buruk, karena pilihan meminta bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur. Rapat memutuskan untuk mengirim utusan ke Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur guna menyampaikan hasil pertemuan tersebut berupa permintaan suplai air dari pompa sumur bor milik PT. Pupuk Kalimantan Timur ke wilayah Guntung.
- **Implementasi**, dari tabel tampak proses implementasi sedang. Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur menugaskan staf di bagian *water treatment* melakukan evaluasi kemampuan kapasitas sumur bor yang berada dekat wilayah Guntung, kapasitas pompa dan kebutuhan air di lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa kapasitas sumur bor, kapasitas pompa dan kebutuhan air di lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur masih mencukupi kebutuhan, maka akhirnya Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur memutuskan untuk memberi suplai air ke wilayah Guntung. PT. Pupuk Kalimantan Timur membangun pipa suplai air dari pompa sumur bor masuk tanki air di Guntung.

- **Pemantauan**, dari tabel menunjukkan baik. Pemantauan dilakukan oleh Biro Umum PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk pemakaian air oleh masyarakat Guntung.

Dari analisis tahapan proses di atas, suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati, karena proses yang lebih berupa pemberian dari PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat Guntung. Proses pemberian air bersih kepada masyarakat Guntung belum memenuhi kriteria CD sehingga belum dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat. Didalam tahapan proses ada pendamping yaitu tokoh masyarakat, tapi tidak berperan sebagai pendamping yang sejati karena pendamping seharusnya dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Disini pendamping hanya melihat potensi perusahaan yang dapat dimanfaatkan tanpa berusaha menjadikan masyarakatnya berdaya. Sejak tahun 2000, PT. Pupuk Kalimantan Timur memberikan bantuan air yang berasal dari Unit pengolahan air di Housing. Kualiatas air dari unit pengolahan air Housing adalah air yang telah diolah, yang mana kualitasnya lebih baik dari air yang dikirim sebelumnya. Sebaiknya pada tahap ini pihak perusahaan tidak langsung memberikan air yang sudah diolah tapi bersama masyarakat Guntung membicarakan bagaimana cara mengolah air sumur bor dengan menggunakan teknologi sederhana. Jadi perusahaan tidak langsung memberikan dalam bentuk jadi air bersih. Perusahaan dapat memberikan penyuluhan tentang teknologi sederhana tepat guna untuk mengolah menjadi air bersih. Perusahaan dapat memberikan penyuluhan bagaimana menggunakan teknologi sederhana membuat air tawar dari air laut, karena wilayah Guntung dekat dengan laut dan sumber panas matahari tersedia. Teknologi ini hanya menggunakan panas sinar matahari untuk menguapkan air laut menjadi air tawar, tidak membutuhkan energi listrik. Teknologi ini hanya menggunakan drum plastik, tutup dari kaca serta peralatan penampung air tawar.

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa suplai air baru merupakan awal dari pemberdayaan masyarakat, karena salah satu konsep pemberdayaan masyarakat mengatakan *merealisasi keadilan distributif*. Air yang diberikan merupakan salah satu bentuk sumber daya alam, dimana PT. Pupuk Kalimantan Timur mengambil air dari sumur yang lokasinya berdekatan dengan wilayah Guntung, sehingga untuk tujuan keadilan maka penduduk sekitarnya berhak pula untuk menikmatinya, terutama akibat tercemarnya sungai Guntung yang semula dapat mereka gunakan sebagai air mandi dan cuci.

Program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil akhir berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta peningkatan kelestarian lingkungan

5.2.1.2. Masjid

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Kepada Masyarakat Guntung

2. Perbaikan Masjid

No.	Proses CD	Pelaksanaan Proses CD			Total
		Baik	Sedang	Buruk	
1.	Identifikasi Permasalahan		1		
2.	Tujuan		1		
3.	Analisis Kondisi			0	
4.	Alternatif Kebijakan			0	
5.	Pilihan Kebijakan			0	
6.	Implementasi		1		
7.	Pemantauan	2			
Total :		2	3	0	5

- **Masalah**, dari tabel tampak proses masalah menunjukkan sedang masyarakat dapat mengidentifikasi masalah. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1985

berada dalam kondisi memprihatinkan karena atap yang terbuat dari seng banyak yang bocor, sehingga jika turun hujan mengganggu orang yang sedang beribadah serta dinding masjid yang terbuat dari kayu banyak yang sudah lapuk.

- **Tujuan**, dari tabel tampak proses tujuan menunjukkan sedang. Perumusan tujuan dilakukan oleh jemaah masjid dan pengurus masjid. Di sini bertindak sebagai pendamping adalah jemaah masjid yang juga tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Para jemaah Masjid dan pengurus masjid berusaha untuk mencari dana perbaikan bangunan masjid.
- **Analisis kondisi**, dari tabel tampak proses analisis kondisi menunjukkan buruk, karena masyarakat belum melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di masyarakat Guntung. pengurus dan jemaah masjid mengadakan pertemuan di masjid untuk mencari jalan bagaimana cara mendapatkan dana guna perbaikan masjid. Di sini pendamping tidak membantu masyarakat melakukan analisis kekuatan atau potensi yang dimiliki. Sebaiknya pendamping membantu masyarakat menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di jemaah masjid/masyarakat Guntung.
- **Alternatif kebijakan**, dari tabel tampak proses alternatif kebijakan buruk, karena tidak dilakukan analisis kondisi, sehingga tidak dilakukan alternatif kebijakan. Pertemuan memilih alternatif yaitu dengan membuat proposal permohonan bantuan dana perbaikan masjid kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur. Menurut konsep pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat berdaya, tidak menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberantas kemiskinan, merealisasi keadilan distributif dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata.

Ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat, proposal permohonan bantuan dana perbaikan masjid dari PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak menjadikan jemaah/masyarakat Guntung berdaya, tapi malah menjadikan masyarakat Guntung menjadi tergantung. Disini peran tokoh masyarakat

belum dapat dikatakan sebagai pendamping karena tidak membantu masyarakatnya untuk mencari potensi atau kekuatan yang ada di masyarakat.

- **Pilihan kebijakan**, alternatif yang dipilih adalah pengurus masjid dan pendamping membawa proposal permohonan bantuan dana perbaikan masjid ke Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- **Implementasi**, manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur setelah mempertimbangkan bahwa Guntung merupakan wilayah yang terdekat dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur dan menurut data kependudukan hampir 90 % masyarakat Guntung memeluk agama Islam, maka Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk dipergunakan perbaikan atap dan dinding masjid bernilai Rp. 50 juta.
- **Pemantauan**, dilakukan oleh Biro Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur sejak pemberian bantuan, pembangunan hingga penyelesaian perbaikan masjid.

Dari tahapan proses di atas, bantuan dana perbaikan masjid dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati, karena proses yang lebih berupa pemberian dari PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada jemaah/masyarakat Guntung guna perbaikan masjid. Proses pemberian bantuan dana perbaikan masjid kepada masyarakat Guntung belum memenuhi kriteria CD sehingga belum dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat. Didalam tahapan proses ada pendamping yaitu tokoh masyarakat, tapi tidak berperan sebagai pendamping yang sejati karena pendamping seharusnya dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Disini pendamping hanya melihat potensi perusahaan yang dapat dimanfaatkan tanpa berusaha menjadikan masyarakatnya berdaya.

5.2.1.3. Kios

**Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur
Kepada Masyarakat Guntung**

3. Bantuan Kios

No.	Proses CD	Pelaksanaan Proses CD			Total
		Baik	Sedang	Buruk	
1.	Identifikasi Permasalahan		1		
2.	Tujuan		1		
3.	Analisis Kondisi			0	
4.	Alternatif Kebijakan			0	
5.	Pilihan Kebijakan			0	
6.	Implementasi		1		
7.	Pemantauan	2			
Total :		2	3	0	5

- **Masalah**, dari tampak proses masalah menunjukkan sedang. Pedagang kaki lima dapat mengidentifikasi permasalahan mereka.
Pada mulanya banyak pedagang kaki lima yang merupakan warga Guntung berdagang di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Guntung. Pihak perusahaan keberatan dengan situasi dan kondisi para pedagang kaki lima yang kumuh, sehingga merencanakan untuk membongkar tempat berjualan pedagang kaki lima tersebut.
- **Tujuan**, dari tabel tampak proses tujuan menunjukkan sedang, karena pedagang kaki lima dapat merumuskan tujuan.
Perumusan tujuan dilakukan oleh masyarakat Guntung dengan pendamping. Bertindak sebagai pendamping disini adalah tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Para pedagang kaki lima yang merupakan warga Guntung merasa gelisah dengan rencana

masyarakatnya untuk mengidentifikasi potensi atau kekuatan yang ada di masyarakat. Tokoh masyarakat Guntung yang berperan sebagai pendamping hanya berfungsi untuk menjembatani antara pihak masyarakat/pedagang kaki lima dengan pihak perusahaan.

- **Pilihan kebijakan**, hasil pembicaraan antara tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan pedagang kaki lima diputuskan akan ada utusan untuk membicarakan dengan pihak Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- **Implementasi**, Pihak Manajemen Perusahaan setelah mempelajari usulan utusan Guntung berupa permintaan bantuan kios, akhirnya memutuskan membangun sebanyak 15 kios di lokasi PT. Pupuk Kalimantan Timur. Kondisi kios yang telah dibangun menjadi lebih tertib dan rapi. Bantuan kios merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, karena adanya pemberdayaan sekelompok masyarakat yang semula berjualan tidak beraturan dan kumuh menjadi tertib, rapi dan bersih. Dengan dibuatkan kios yang kondisinya lebih baik, rapi dan bersih, maka pendapatan para penjual meningkat. Umumnya pedagang yang menempati kios tersebut adalah pedagang makanan dan minuman. Dengan kondisi kios yang rapi dan bersih, menjadikan banyak pembeli mau datang, sehingga pendapatan pedagang meningkat. Pedagang kaki lima membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih.
- **Pemantauan**, pihak Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur secara berkala melakukan pemantauan sejak pembuatan kios hingga tahap penggunaan.

Dari tahapan proses di atas bantuan kios dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati, karena belum dilakukan analisis kondisi dan alternatif kebijakan.

Didalam tahapan proses ada pendamping yaitu tokoh masyarakat, tapi tidak berperan sebagai pendamping yang sejati karena pendamping seharusnya dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga para pedagang kaki lima bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Disini pendamping hanya melihat potensi perusahaan yang

pembongkaran tempat berdagangnya, dan mengadukan nasibnya kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat.

- **Analisis kondisi**, dari tabel tampak proses analisis kondisi menunjukkan buruk, karena pedagang kaki lima yang merupakan masyarakat Guntung belum melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di masyarakat Guntung

Para pedagang khawatir jika tempat berdagang mereka selama ini dibongkar, mereka kesulitan mencari lapangan pekerjaan baru untuk penghidupan. Jika diminta untuk membuka usaha di tempat lain, mereka khawatir tidak dapat mendapatkan hasil seperti yang selama ini mereka peroleh. Saat itu belum dilakukan analisis kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima.

- **Alternatif kebijakan**, dari tabel tampak proses alternatif kebijakan buruk, karena tidak dilakukan analisis kondisi, sehingga tidak dilakukan alternatif kebijakan.

Alternatif yang diusulkan dari hasil pembicaraan tersebut adalah meminta perusahaan bersedia menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima serta membuat kios. Lokasi kios tetap seperti semula yaitu di wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berbatasan dengan pagar wilayah Guntung. Alternatif ini dipilih agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.

Menurut konsep pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat berdaya, tidak menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberantas kemiskinan, merealisasi keadilan distributif dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata.

Bantuan kios untuk masyarakat Guntung menurut kriteria di atas menjadikan masyarakat Guntung berdaya dan tidak bergantung kepada perusahaan. Pada tahapan ini pihak perusahaan lebih memberikan kail ketimbang ikan. Dengan tetap berjualan para pedagang kaki lima berarti perusahaan telah menghindari terjadinya pengangguran, dan itu berarti menghindari masyarakat Guntung dari kemiskinan. Peran tokoh masyarakat sebagai pendamping belum dapat dikatakan sebagai pendamping yang sejati karena belum membantu

dapat dimanfaatkan tanpa berusaha menjadikan masyarakatnya berdaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Di sini fungsi pendamping hanya untuk menjembatani antara kebutuhan para pedagang Guntung dengan konsep perusahaan.

5.2.1.4. Program Baitul Maal

Baitul maal memberikan bantuan kepada masyarakat Guntung berdasarkan:

- hasil tim survey baitul maal
- permohonan dari masyarakat yang tidak mampu yang di ketahui oleh ketua RT dan atau Lurah
- informasi dari orang-orang yang peduli dengan kemiskinanarganya.

Di dalam memberikan bantuannya, dilakukan wawancara apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Ditanyakan apakah yang bersangkutan ingin membuka usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

Salah satu kriteria seseorang diberi zakat adalah orang miskin, yaitu orang yang mempunyai sumber penghasilan, akan tetapi tidak dapat membiayai separuh atau sebagian dari kebutuhan hidupnya.

Menurut konsepnya pemberdayaan masyarakat berarti dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Di sini program zakat baitul maal memang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, kesejahteraan dan kemandirian. Tapi program zakat ini belum dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat karena yang terlibat bukan sekelompok masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat menurut **Christenson (1989)** adalah sekelompok orang yang melakukan perubahan sosial untuk merubah ekonomi mereka. Program zakat baitul maal masjid Baiturrahman yang dilakukan selama ini adalah bantuan untuk membantu atau meningkatkan kondisi ekonomi seseorang belum melibatkan suatu *community* atau sekelompok orang.

Agar program zakat baitul maal dapat juga berfungsi sebagai program pemberdayaan masyarakat, hendaknya baitul maal membuat suatu tim survey,

kemudian dilakukan wawancara dengan sekelompok masyarakat di wilayah Guntung, apa yang ingin mereka lakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, mencari tahu kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada di masyarakat Guntung, kemudian secara bersama-sama mereka mencari solusinya, sehingga program baitul maal dapat melibatkan dan meningkatkan sekelompok orang dan zakat tersebut akan lebih bermanfaat karena melibatkan banyak orang.

5.2.2. Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur Bagi Masyarakat Guntung

Adapun respon masyarakat atas bantuan-bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur ini positif, mereka mengatakan bahwa suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur sangat bermanfaat. Air merupakan zat yang esensial untuk kehidupan manusia. Hal ini mengingat sumber air yang ada di daerah Bontang sangat terbatas, tidak terdapat aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum.

“Setahu saya bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk masyarakat Guntung adalah suplai air dan bantuan Masjid. Menurut saya bantuan ini terutama air, sangat membantu warga Guntung, karena air bersih sulit di peroleh di Guntung “. (Bapak Suk, 57 tahun, warga Guntung)

Pada umumnya sumber air minum bagi masyarakat Bontang berasal dari sumur dalam, tapi di Guntung air minum dapat diperoleh dari sumur dangkal (sumur dengan kedalaman 4 meter). Sumber air di wilayah Bontang banyak mengandung unsur Besi dan bersifat asam, sehingga perlu dilakukan *treatment* untuk mendapatkan air yang dapat digunakan sebagai air minum. Kebutuhan air untuk MCK (mandi, cuci dan kakus) diperoleh melalui sumur dangkal dan penampungan air hujan.

Masyarakat juga menyambut baik atas bantuan perusahaan untuk perbaikan masjid dan kios. Berikut respon warga Guntung atas bantuan masjid Guntung.

“Kami warga Guntung sangat senang menerima bantuan renovasi masjid dari PT. Pupuk Kalimantan Timur. Sebenarnya kami sudah lama menunggu bantuan ini, tapi baru sekarang bantuan kami terima. Menurut kami sejak

Bapak Omay K Wiraatmadja menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, perhatian beliau sangat besar kepada warga Guntung” (Djuarip, 38 tahun)

5.2.3. Dampak Bantuan Bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Bontang, khususnya yang berada di sekitar pabrik yaitu Guntung dan Loktuan merasakan manfaat dengan adanya bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur.

“Saya merasakan manfaat apa yang di lakukan oleh PKT untuk masyarakat Guntung. Yang saya rasakan terutama adalah suplai air dan bantuan perbaikan masjid. Saya merasa nyaman beribadah di masjid Guntung” (Kardi, 65 tahun)

“Pemberian *community development* oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur selama ini sudah berjalan dengan baik, yang sampai saat ini mencapai 60 persen untuk Bontang. Namun demikian lebih baik lagi jika hal tersebut ditingkatkan. Sebagai warga maupun pemerintah kota, kami mengharapkan agar pemberian *comdev* perlu ditingkatkan lagi ” (Kabag Humas Pemkot Bontang).

“Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh PKT yaitu *Comdev Award* dan *CEO Award* dalam BUMN Expo 2002. Saya kira hal itu bukan hanya kebanggaan perusahaan saja, tetapi juga menjadi kebanggaan saya dan seluruh masyarakat Bontang” (dr. Sofyan Hasdam, Walikota Bontang).

Bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Guntung, mendapat sambutan baik dari masyarakat Guntung. Masyarakat Guntung merasakan adanya manfaat dengan keberadaan perusahaan berkaitan dengan bantuan suplai air bersih, perbaikan masjid dan bantuan kios.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada masyarakat Guntung mendapat respon positif. Perusahaan juga telah memperoleh penghargaan *Comdev Award* dari pemerintah. Penghargaan yang diterima merupakan penghargaan atas semua program *community development* yang dilakukan PT. Pupuk Kalimantan Timur di wilayah Bontang, khususnya daerah *buffer zone* yaitu wilayah Guntung, Sidrap dan Loktuan. Jadi pernyataan diatas telah menyanggah pihak-pihak yang mengatakan bahwa PT. Pupuk

Kalimantan Timur tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Guntung. Pernyataan yang mengatakan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak berbuat banyak untuk masyarakat Guntung hanya berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Ada baiknya perusahaan bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang benar-benar bekerja untuk memajukan masyarakat Guntung. LSM ini nanti yang akan menyanggah dan berfungsi sebagai corong bila ada yang mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

5.2.4. Model Program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung

Model yang diajukan berikut adalah model kualitatif, yaitu model pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk masyarakat Guntung.

5.2.4.1. Model Suplai Air Bersih

Pendamping di sini adalah hendaknya orang yang berasal dari masyarakat Guntung sendiri, yang paham dan mengetahui persoalan masyarakat Guntung, sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Menurut Santoso, prinsip CD adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik dan pelembagaan. Pendamping harus dapat mendampingi untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat. Masyarakat Guntung hendaknya turut partisipasi aktif dalam proses CD, sehingga program CD dapat berhasil.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping, melalui diskusi dan curah pendapat. Hasil identifikasi permasalahan yaitu :

- air sungai Guntung tercemar, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan air sungai Guntung untuk mandi dan cuci.

- mencari pengganti air sungai Guntung untuk kebutuhan mandi dan cuci

b. Tujuan

Secara teknis perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Guntung dengan pendamping. Beberapa pertanyaan yang diajukan pendamping untuk membantu dalam perumusan tujuan tersebut antara lain mengapa air sungai Guntung tidak dapat digunakan sebagai air mandi dan cuci, mengapa harus meminta suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, apakah tidak ada sumber air selain dari perusahaan tersebut, siapa yang akan menemui pihak perusahaan, dan dengan cara apa air dari perusahaan tersebut dialirkan ke Guntung?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung. Fasilitator bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dasar berupa air bersih dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan. Dengan meminta bantuan suplai air bersih ke PT. Pupuk Kalimantan Timur akan menjadikan masyarakat menjadi tergantung.

d. Alternatif Kebijakan

Melakukan alternatif kebijakan konsep kebutuhan masyarakat Guntung berupa air bersih. Pendamping membantu masyarakat untuk tidak tergantung kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur, tapi berusaha membantu masyarakat menemukan sendiri potensi yang dimiliki. Beberapa alternatif untuk mendapatkan air bersih antara lain:

- membuat penyaringan air sederhana dengan menggunakan lapisan yang terdiri dari pasir yang berfungsi untuk menyaring kotoran, arang yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan rasa, dan air sebelum masuk penyaringan dihembuskan udara untuk tujuan mengendapkan unsur besi. Penambahan bahan kimia berupa kapur dan kaporit untuk membunuh kuman. Sumber air dapat dari sungai Guntung atau air sumur.

- menggunakan teknologi sederhana penguapan air laut dengan menggunakan panas matahari.

PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat diminta untuk membantu memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat Guntung tentang bagaimana penerapan teknologi tersebut di atas serta membuat proyek percontohan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di wilayah Guntung.

Jadi usulan pengadaan air bersih datang dari bawah, yaitu dari masyarakat Guntung, sedangkan pihak perusahaan membantu memberikan pelatihan atau penyuluhan sehingga usulan dari masyarakat dapat direalisasikan. Dengan dibuat proyek percontohan proses penyaringan air ataupun proses penguapan air laut menjadi air bersih, masyarakat tinggal meniru.

e. Pilihan Kebijakan

Disini ada proses penyatuan (kristalisasi) konsep yang datang melalui pendekatan dari bawah (bottom up planning) yaitu masyarakat Guntung dengan konsep dari atas (top down planning) yaitu pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur.

f. Implementasi

Konsep yang telah mengkristal menjadi acuan tindak kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat Guntung.

g. Pemantauan

Didalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan pemantauan, sampai sejauh mana pelaksanaan di lapangan, apakah terdapat penyimpangan selama pelaksanaannya. Dengan pemantauan dapat dilakukan segera perbaikan sedini mungkin. Dan setelah proyek tersebut selesai, tetap dilakukan pemantauan pula, agar proyek atau kegiatan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan proyek yang telah dibuat. Dengan diketahui

kelemahan tersebut, dapat dilakukan tindakan perbaikan atau modifikasi sehingga proyek dapat di sempurnakan.

Pemantauan dapat dilakukan secara berkala, apakah setiap minggu atau setiap bulan tergantung kebutuhannya.

5.2.4.2. Model Perbaikan masjid

Pendamping yang dipilih hendaknya orang yang berasal dari masyarakat Guntung sendiri, yang paham dan mengetahui persoalan masyarakat Guntung, khususnya masalah masjid Guntung, sehingga proses keberhasilan dalam perbaikan masjid harus datang dari masyarakat itu sendiri. Proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat. Masyarakat Guntung hendaknya turut partisipasi aktif dalam proses CD, sehingga program CD dapat berhasil.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan dibantu oleh pendamping, melalui diskusi dan curah pendapat. Hasil identifikasi permasalahan terdiri atas dua hal, yaitu:

- masjid perlu dilakukan perbaikan
- cara memperoleh dana untuk perbaikan masjid.

b. Tujuan

Secara teknis perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh jemaah masjid Guntung dan pengurus masjid yang difasilitasi oleh pendamping. Beberapa pertanyaan yang diajukan fasilitator untuk membantu dalam perumusan tujuan tersebut antara lain mengapa masjid perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diperbaiki, berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk perbaikan

masjid, bagaimana cara mencari dana untuk perbaikan masjid, mengapa harus meminta bantuan dana ke PT. Pupuk Kalimantan Timur, apakah tidak ada sumber dana lain, siapa yang akan menemui pihak perusahaan untuk meminta bantuan?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung untuk perbaikan masjid. Fasilitator bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan perbaikan masjid dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan. Dengan meminta bantuan dana perbaikan ke PT. Pupuk Kalimantan Timur akan menjadikan masyarakat menjadi tergantung.

d. Alternatif Kebijakan

Melakukan alternatif kebijakan konsep kebutuhan masyarakat Guntung untuk perbaikan masjid. Fasilitator membantu masyarakat untuk tidak tergantung kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur, tapi berusaha membantu masyarakat menemukan sendiri potensi yang dimiliki.

Beberapa alternatif untuk perbaikan masjid antara lain:

- masyarakat mengumpulkan sumber daya yang tersedia misalnya kayu dan batako. PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat diminta bantuan untuk menyediakan semen, sedangkan pasir disediakan oleh masyarakat. Menyediakan termasuk pembuatan batako. Kebutuhan kayu diusahakan oleh masyarakat sendiri dari wilayah Guntung, sedangkan material bangunan yang benar-benar tidak tersedia di Guntung dapat meminta bantuan ke perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan dinding dan atap dilakukan oleh masyarakat Guntung sendiri, dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.
- masyarakat mengumpulkan dana dari masyarakat Guntung, dan kekurangannya meminta bantuan ke perusahaan. Bantuan dari perusahaan

hendaknya berupa material yang benar-benar tidak dapat diperoleh dari wilayah Guntung, sedangkan pelaksanaan perbaikan dilakukan sendiri oleh masyarakat Guntung.

e. Pilihan Kebijakan

Disini ada proses penyatuan (kristalisasi) konsep yang datang melalui pendekatan dari bawah (bottom up planning) yaitu masyarakat Guntung dengan konsep dari atas (top down planning) yaitu pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur.

f. Implementasi

Konsep yang telah mengkristal yang menjadi acuan tindak kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat Guntung.

g. Pemantauan

Didalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan pemantauan, sampai sejauh mana pelaksanaan di lapangan, apakah terdapat penyimpangan selama pelaksanaannya. Dengan pemantauan dapat dilakukan segera perbaikan sedini mungkin. Setelah proyek tersebut selesai, tetap dilakukan pemantauan pula, agar proyek atau kegiatan yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan proyek yang telah dibuat. Dengan diketahui kelemahan tersebut, dapat dilakukan tindakan perbaikan atau modifikasi sehingga proyek dapat di sempurnakan.

Pemantauan dapat dilakukan secara berkala, apakah setiap minggu atau setiap bulan tergantung kebutuhannya.

5.2.4.3. Model Pembuatan Kios

Pendamping di sini adalah hendaknya orang yang berasal dari masyarakat Guntung sendiri, yang paham dan mengetahui persoalan masyarakat Guntung, sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus dapat membantu

masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat. Masyarakat Guntung hendaknya turut partisipasi aktif dalam proses CD, sehingga program CD dapat berhasil.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping, melalui diskusi dan curah pendapat. Hasil identifikasi permasalahan yaitu pedagang kaki lima yang merupakan masyarakat Guntung tetap dapat berdagang sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

b. Tujuan

Secara teknis perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh para pedagang kaki lima yang difasilitasi oleh pendamping. Pendamping disini adalah tokoh masyarakat Guntung dan ketua adat. Beberapa pertanyaan yang diajukan pendamping untuk membantu dalam perumusan tujuan tersebut antara lain mengapa harus berjualan di tempat tersebut, apakah tidak ada tempat lain untuk berusaha, apakah hanya tempat itu satu-satunya tempat berdagang, mengapa harus meminta bantuan kios dari PT. Pupuk Kalimantan Timur, siapa yang akan menemui pihak perusahaan?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan untuk berjualan dengan memperhatikan kerapian, kebersihan dan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan. Dengan meminta bantuan kios ke PT. Pupuk Kalimantan Timur akan menjadikan masyarakat menjadi tergantung.

d. Alternatif Kebijakan

Melakukan alternatif kebijakan konsep kebutuhan masyarakat Guntung berupa kebutuhan lokasi berdagang. Pendamping membantu masyarakat untuk tidak tergantung kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur, tapi berusaha membantu masyarakat menemukan sendiri potensi yang dimiliki. Beberapa alternatif untuk tetap dapat berjualan antara lain:

- mencari lokasi berjualan di tempat lain, karena lokasi berjualan sebelumnya merupakan wilayah PT. Pupuk Kalimantan Timur. Lokasi atau tempat berjualan yang dekat dengan Guntung seperti Loktuan.

- meminta izin ke PT. Pupuk Kalimantan Timur agar tetap diberi izin berjualan di wilayah perusahaan. PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat memberikan lay-out tempat berjualan yang rapi dan tertib, serta membuat contoh kios yang baik. Menurut Santoso, prinsip CD adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik dan pelembagaan. Pihak perusahaan dapat memberikan penyuluhan berupa manajemen usaha kecil agar pedagang dapat meningkatkan hasil usahanya.

e. Pilihan Kebijakan

Disini ada proses penyatuan (kristalisasi) konsep yang datang melalui pendekatan dari bawah (bottom up planning) yaitu masyarakat Guntung dengan konsep dari atas (top down planning) yaitu pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur.

f. Implementasi

Konsep yang telah mengkristal yang menjadi acuan tindak kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat Guntung.

g. Pemantauan

Didalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan pemantauan, sampai sejauh mana pelaksanaan di lapangan, apakah terdapat penyimpangan selama pelaksanaannya. Dengan pemantauan dapat dilakukan segera

perbaikan sedini mungkin. Dan setelah proyek tersebut selesai, tetap dilakukan pemantauan pula, agar proyek atau kegiatan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan proyek yang telah dibuat. Dengan diketahui kelemahan tersebut, dapat dilakukan tindakan perbaikan atau modifikasi sehingga proyek dapat di sempurnakan.

Pemantauan dapat dilakukan secara berkala, apakah setiap minggu atau setiap bulan tergantung kebutuhannya.

5.2.4.4. Model Bantuan Zakat Maal

Pendamping di sini adalah hendaknya orang yang berasal dari masyarakat Guntung sendiri, yang paham dan mengetahui persoalan masyarakat Guntung, sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Guntung bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat. Masyarakat Guntung hendaknya turut partisipasi aktif dalam proses CD, sehingga program CD dapat berhasil.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pengurus baitul maal masjid Baiturrahman melalui diskusi dan curah pendapat.

b. Tujuan

Secara teknis perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Guntung. Pendamping disini adalah pengurus baitul maal masjid Baiturrahman. Beberapa pertanyaan yang diajukan pendamping untuk membantu masyarakat dalam perumusan tujuan tersebut.

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan masyarakat Guntung dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

d. Alternatif Kebijakan

- Melakukan alternatif kebijakan konsep kebutuhan masyarakat Guntung.
- Menurut Santoso, prinsip CD adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik dan pelembagaan. Pihak pendamping dapat memberikan penyuluhan yang diperlukan oleh masyarakat Guntung.

e. Pilihan Kebijakan

Disini ada proses kristalisasi konsep yang datang melalui pendekatan dari bottom up planning yaitu masyarakat Guntung dengan konsep dari pengurus baitul maal masjid Baiturrahman.

f. Implementasi

Konsep yang telah mengkristal yang menjadi acuan tindak kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat Guntung.

g. Pemantauan

Didalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan pemantauan, sampai sejauh mana pelaksanaan di lapangan, apakah terdapat penyimpangan selama pelaksanaannya. Dengan pemantauan dapat dilakukan segera perbaikan sedini mungkin. Dan setelah proyek tersebut selesai, tetap dilakukan pemantauan pula, agar proyek atau kegiatan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan proyek yang telah dibuat. Dengan diketahui kelemahan tersebut, dapat dilakukan tindakan perbaikan atau modifikasi sehingga proyek dapat di sempurnakan.

BAB VI

SIMPULAN dan SARAN

Bab ini terdiri dari sub bab simpulan dan sub bab saran sebagai berikut.

6.1. Simpulan

6.1.1. Manfaat program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur bagi masyarakat Guntung.

Masyarakat Guntung merasakan manfaat bantuan dari PT. Pupuk Kalimantan Timur.

6.1.2. Dampak program pemberdayaan bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Masyarakat Guntung memberikan respon positif atas bantuan PT. Pupuk Kalimantan Timur, di samping itu perusahaan telah memperoleh Comdev Award dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa tidak benar PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Guntung.

6.1.3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung

6.1.3.1 Air Bersih

Dari analisis tahapan proses CD yaitu masalah, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, dan implementasi, bahwa suplai air dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati. Peran pendamping yaitu tokoh masyarakat belum berperan sebagai pendamping yang sejati.

6.1.3.2 Masjid

Dari analisis tahapan proses CD yaitu masalah, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, dan implementasi, bahwa bantuan dana untuk perbaikan masjid dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati. Peran pendamping yaitu tokoh masyarakat belum berperan sebagai pendamping yang sejati.

6.1.3.3 Kios

Dari analisis tahapan proses CD yaitu masalah, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, dan implementasi, bahwa bantuan kios dari PT. Pupuk Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejati. Peran pendamping yaitu tokoh masyarakat belum berperan sebagai pendamping yang sejati.

6.1.3.4 Program Baitul Maal

Program zakat baitul maal masjid Baiturrahman PT. Pupuk Kalimantan Timur belum merupakan bantuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu *community* atau sekelompok orang.

6.2. Saran

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Guntung yang telah dilakukan selama ini belum dapat sepenuhnya dikatakan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, maka berikut diusulkan model pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat Guntung.

a. Model Suplai Air Bersih

Model yang digunakan sebaiknya menggunakan frame tujuh langkah, terdiri dari masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan. Pendamping hendaknya bersama masyarakat Guntung melakukan analisis kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dasar berupa air bersih dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

b. Model Perbaikan masjid

Model yang digunakan menggunakan frame tujuh langkah, terdiri dari masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan. Pendamping hendaknya bersama masyarakat

Guntung melakukan analisis kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Guntung. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dana guna perbaikan masjid. dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

c. Model Pembuatan Kios

Model yang digunakan menggunakan frame tujuh langkah, terdiri dari masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan. Pendamping hendaknya bersama masyarakat Guntung melakukan analisis kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada pedagang kaki lima. Pendamping bersama pedagang kaki lima menyusun program untuk menjawab kebutuhan mata pencaharian. dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

d. Model Bantuan Zakat Masjid Baiturrahman

Model yang digunakan menggunakan frame tujuh langkah, terdiri dari masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan pemantauan. Pendamping hendaknya bersama masyarakat melakukan analisis kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada pedagang kaki lima. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

2. PT. Pupuk Kalimantan Timur perlu bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang benar-benar berjuang untuk memberdayakan masyarakat Guntung. Dengan bekerja sama dengan LSM ini, PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat menghemat tenaga di dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Guntung. LSM ini juga berfungsi untuk memantau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Guntung sekaligus sebagai

- mitra kerja dan corong jika ada elemen-elemen masyarakat yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
3. Perlu pemberian penghargaan bagi pendamping melalui pelatihan pelatihan fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi Bachtiar 2002, *Riwayat Singkat PT. Pupuk Kaltim Bontang*, Lembaga Kepustakaan & Penerbitan Pustaka Pulau Kumala

Hadi, Sudharto P. 2003, *Community Development*, Catatan kuliah, Program Magister Ilmu Lingkungan, 2003, Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2001, *Comparative Analysis Of Community Development: Developed And Developing Countries*, Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, *Metodologi Penelitian Lingkungan, Bahan kuliah Program Magister Ilmu Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Irwin T. Sanders 1958, "Theories of Community Development", *Journal Rural Sociology*, vol. 23.

Jakti Dorodjatun Kuntjoro, 1986, "Kemiskinan Di Indonesia", Edisi Pertama, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Muhammadi, Erman Aminullah, Budhi Soesilo, 2001, "Analisis Sistem Dinamis" Edisi Pertama, Penerbit UMJ Press, Jakarta

PT. Pupuk Kalimantan Timur, *Dasawarsa Pupuk Kaltim*, Bontang

_____, *Fokus Utama*, hal. 4~12, 2001, Buletin Nomor: 03/XXII, Bontang

_____, *laporan Utama*, hal. 4~12, 2003, Buletin edisi Juni-Juli, Bontang

Paul B Horton, Chester L, Hunt 1999, *Sosiologi*, Jilid 1, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Paul B Horton, Chester L, Hunt, *Sosiologi* 1999, Jilid 2, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Santoso Edi, *Lingkungan Sosial dan Budaya*, Diktat Kuliah, Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Syachrinuddin SEMAN, *Pembangunan Wilayah: Bagian dari Pemberantasan Kemiskinan*, Mei-Juni 1990 Tahun XIX No.3, Analisis CSIS.

The Community Economic-Development Approach,1990 *From the Bottom Up*, A Statement by the Economic Council of Canada.